



MASTERPLAN SMART REGENCY PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

**Edisi Revisi 2026-2029
ANALISA KESIAPAN DAERAH**

BUKU I

DIBUAT DAN DIREVISI OLEH:

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIKA,
DAN PERSANDIAN**

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Sasaran	4
1.4 Landasan Hukum	4
BAB 2 ANALISIS KONDISI DAERAH	6
2.1 Kondisi Daerah.....	6
2.2 Demografi dan Ketenagakerjaan.....	14
2.3 Perbandingan Regional	22
2.4 Analisis Kesiapan Daerah	28
2.5 Analisis Daya Saing Daerah	34
2.6 Analisis Kondisi Masa Depan.....	55
BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH.....	69
3.1 Visi Kabupaten Muara Enim.....	69
3.2 Misi Kabupaten Muara Enim	71
3.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Muara Enim.....	72
3.4 Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim	75
3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
BAB 4 PENUTUP.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim.....	6
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Muara Enim	8
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Muara Enim	9
Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Muara Enim	10
Gambar 2.5 Curah Hujan Bulanan Maksimum dan Rata-rata Suhu Udara	13
Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.....	17
Gambar 2.7 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil Long Form SP2020) Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	23
Gambar 2.8 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	25
Gambar 2.9 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	27
Gambar 2.10 Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Muara Enim.....	29
Gambar 2.11 Peta Daerah Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Muara Enim	30
Gambar 2.12 Peta Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Muara Enim	31
Gambar 2.13 Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.....	33
Gambar 2.14 Jumlah Investor PMA/PMDN yang Berinvestasi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023	53
Gambar 3.1 Visi Kabupaten Muara Enim 2025-2029	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	7
Tabel 2.2 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan.....	14
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Muara Enim, 2024	16
Tabel 2.4 Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	20
Tabel 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil Long Form SP2020) Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024.....	24
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.10 Rasio Angka Ketergantungan Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023	35
Tabel 2.12 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021-2023	36
Tabel 2.13 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop/Tablet Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024.....	40
Tabel 2.14 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Muara Enim Tahun 2023	42
Tabel 2.15 Indikator Kualitas Hunian di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023.....	43
Tabel 2.16 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024.....	44
Tabel 2.17 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.18 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024.....	46
Tabel 2.19 Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024	47



Tabel 2.20 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024	49
Tabel 2.21 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024	50
Tabel 2.22 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024.....	51
Tabel 2.23 Nilai Investasi (dalam juta) PMA dan PMDN di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023	54
Tabel 3.1 Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029.....	71
Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029	72
Tabel 3.3 Sandingan Tahapan Pembangunan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2026-2030	74



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tren pembangunan dan pengembangan kota di era digital telah berubah. Perubahan ini didorong oleh berubahnya secara signifikan peradapan dan budaya manusia akibat adanya fenomena revolusi digital atau revolusi industri ke-4 dan juga peran kecerdasan buatan. Perubahan-perubahan yang terjadi pun bersifat baru dan tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Konsep *Smart City* merupakan framework yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien yang mampu mengakomodasi tantangan dan identitas masing-masing kota yang unik dan jauh berbeda.

Walaupun terminologi yang paling dikenal adalah smart city namun variasi yang ada sebenarnya lebih beragam. Alternatif lain yang biasa digunakan misalnya *smart region*, *smart province*, *smart city/regency*, *digital city*, *future city*, dan *sustainable city*. Beragam istilah tersebut memiliki fundamental dan paradigma yang sama yaitu sebuah strategi progresif dalam memecahkan masalah dan tantangan utama perkotaan dengan inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi terkini sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*).

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama di kawasan perkotaan dan juga daerah-daerah. Transformasi digital ini didorong oleh beberapa faktor utama, seperti penetrasi internet yang semakin luas, adopsi perangkat mobile yang tinggi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi melalui program seperti Smart City. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang, telah menjadi pusat inovasi digital karena memiliki infrastruktur yang lebih baik, tingkat literasi teknologi yang tinggi, serta ekosistem startup yang berkembang pesat. Tren ini terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan berbasis digital, seperti e-commerce, transportasi online, fintech, dan layanan publik berbasis aplikasi. Selain itu, pandemi COVID-19 turut mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan digital antara kota besar dan daerah terpencil, isu keamanan siber, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren teknologi digital di kota-kota Indonesia menjadi penting untuk merumuskan strategi pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan.



Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, suatu daerah yang diberkahi dengan potensi SDM dan sumberdaya alam yang melimpah. Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Muara Enim berada pada fase transformatif karena telah memiliki pemimpin daerah yang baru serta berkomitmen dalam penguatan ekonomi lokal melalui strategi RPJMD 2025-2029 dan APBD yang adaptif, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penegakan hukum pertambangan, serta ketahanan pangan berkelanjutan. Meski bergantung pada batu bara, pemerintah daerah mendorong diversifikasi ekonomi, kesetaraan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semua strategi ini didukung oleh perencanaan komprehensif, anggaran memadai, sinergi segenap perangkat daerah dan masyarakat, dan penegakan tata kelola yang transparan, tertuang dalam slogannya MEMBARA (Muara Enim Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan), yang menjadi visi utama Kabupaten Muara Enim untuk periode 2025–2029.

Dalam mendukung ketercapaian visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peran aktif kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO), berkomitmen untuk mengelola yang sudah ada dengan sebaik-baiknya dan tetap bereksplorasi menggali segala potensi yang dapat dicapai. Inovasi merupakan nafas yang sudah menyatu dengan semangat pembangunan di Muara Enim sehingga tentu saja konsep smart city merupakan konsep yang sejalan dan sangat relevan untuk diterapkan di Kabupaten Muara Enim. Adapun wujud nyatanya adalah melakukan pembaharuan atas *MasterPlan Smart Regency* Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Muara Enim Yang Cerdas) untuk tahun 2026-2029.

Masterplan ini berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kabupaten yang selaras dengan Visi-Misi Kepala Daerah, dan juga APBD. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas, dan karakter kota, *Masterplan Muara Enim Smart Regency* juga dimaksudkan untuk mempermudah bukan hanya pemerintah, namun juga warga, entitas bisnis, dan semua stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan inovasi dan menjadi bagian dari perubahan.



1.2 Maksud dan Tujuan

Bagaimanapun juga proses pembangunan *Smart Regency* merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika, hal ini dikarenakan pada tahap-tahap tertentu usaha pembangunan smart regency juga perlu melibatkan semua pihak di tingkat daerah dalam hal ini di Kabupaten Muara Enim maupun tingkat pusat, baik dari warga, pemerintah, swasta, maupun stakeholder lainnya. Selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (*alignment*) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) atas rencana pembangunan *smart regency* yang diinisiasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFO) Kabupaten Muara Enim sepenuhnya menyadari bahwa pembangunan *smart regency* merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen Masterplan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dan alat bantu bagi pemerintah daerah, tim penggerak dan pendamping, serta entitas lain yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan Kabupaten Muara Enim berdasarkan konsep *Smart Regency*.

Adapun tujuan dari disusunnya Masterplan Muara Enim *Smart Regency* adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung ketercapaian Visi-Misi MEMBARA dan program strategis;
- b. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *Smart Regency* di tingkat pusat dan tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Muara Enim;
- c. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan Kabupaten Muara Enim berdasarkan konsep *Smart Regency*;
- d. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD 2025-2029 dalam dokumen perencanaan Muara Enim *Smart Regency*;
- e. Mendorong proses pengembangan Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten cerdas (*smart regency*) yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.



1.3 Sasaran

Adapun sasaran dari disusunnya Masterplan Muara Enim *Smart Regency* antara lain:

1. Menyediakan panduan perencanaan pengembangan Kabupaten Muara Enim berdasarkan 6 dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*).
2. Menyusun prioritas pembangunan Muara Enim *Smart Regency* dalam jangka pendek dan jangka menengah.
3. Terlaksananya program Muara Enim *Smart Regency* sesuai dengan masterplan yang telah disusun termasuk program *Quick Win* dalam 1 tahun kedepan.
4. Membantu pemerintah daerah dalam tata pamong (*governance*) dan tata kelola (manajemen) pengembangan *Smart Regency* sehingga dapat berlangsung secara sistematis, transparan, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam revisi *Masterplan Smart Regency (2026-2029)* ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
9. Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;



14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2019 tentang Master Plan Muara Enim *Smart Regency*
15. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Muara Enim;
16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.



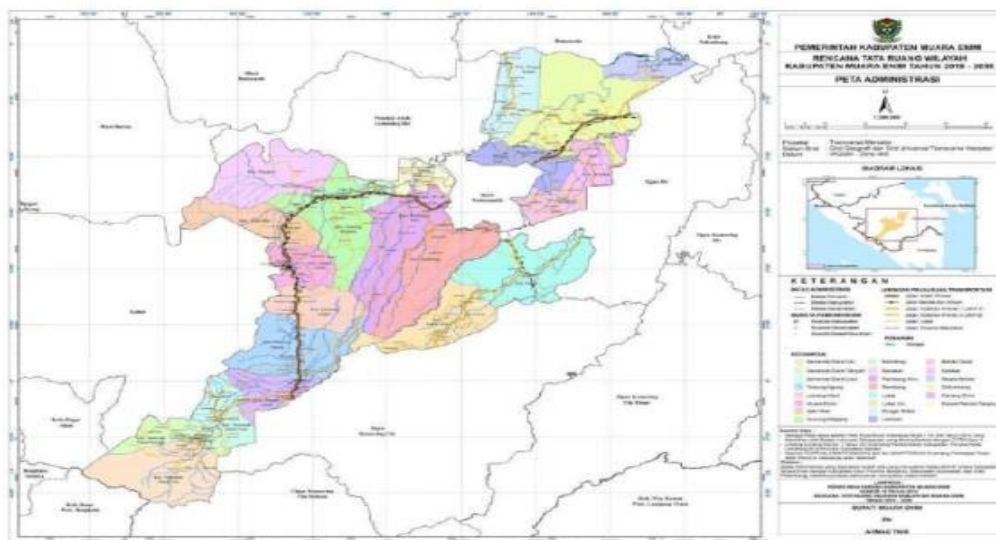
BAB 2

ANALISIS KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Luas dan Letak Geografis

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu (1) kabupaten dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Letak Geografis Kabupaten Muara Enim antara 3° 3' 21" sampai 4° 15' 14" Lintang Selatan dan 103° 18' 18" sampai 104° 42' 4,99" Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km², terdiri dari 22 kecamatan, 246 desa definitif, dan 10 kelurahan dengan ibu kota Kabupaten terletak di Kecamatan Muara Enim.



Gambar 0.1
Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim

Wilayah kabupaten Muara Enim terletak di tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam dan Kota Prabumulih.

Tabel.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas	Jumlah Desa
1	Semende Darat Laut	269,14	3,60	10
2	Semende Darat Ulu	426,64	5,70	10
3	Semende Darat Tengah	302,24	4,04	12
4	Tanjung Agung	517,10	6,91	14
5	Panang Enim	192,94	2,58	12
6	Rambang	378,07	5,05	13
7	Lubai	529,32	7,07	10
8	Lubai Ulu	478,49	6,39	11
9	Lawang Kidul	287,26	3,84	7
10	Muara Enim	187,08	2,50	16
11	Ujan Mas	311,13	4,16	9
12	Gunung Megang	471,36	6,30	13
13	Benakat	451,96	6,04	6
14	Belimbing	148,69	1,99	10
15	Rambang Niru	634,98	8,49	16
16	Empat Petulai Dangku	138,35	1,85	10
17	Gelumbang	705,57	9,43	23
18	Lembak	101,44	1,36	10
19	Sungai Rotan	344,14	4,60	19
20	Muara Belida	204,67	2,74	8
21	Kelekar	138,03	1,84	7
22	Belida Darat	264,26	3,53	10
Total		7.482,86	100,00	256

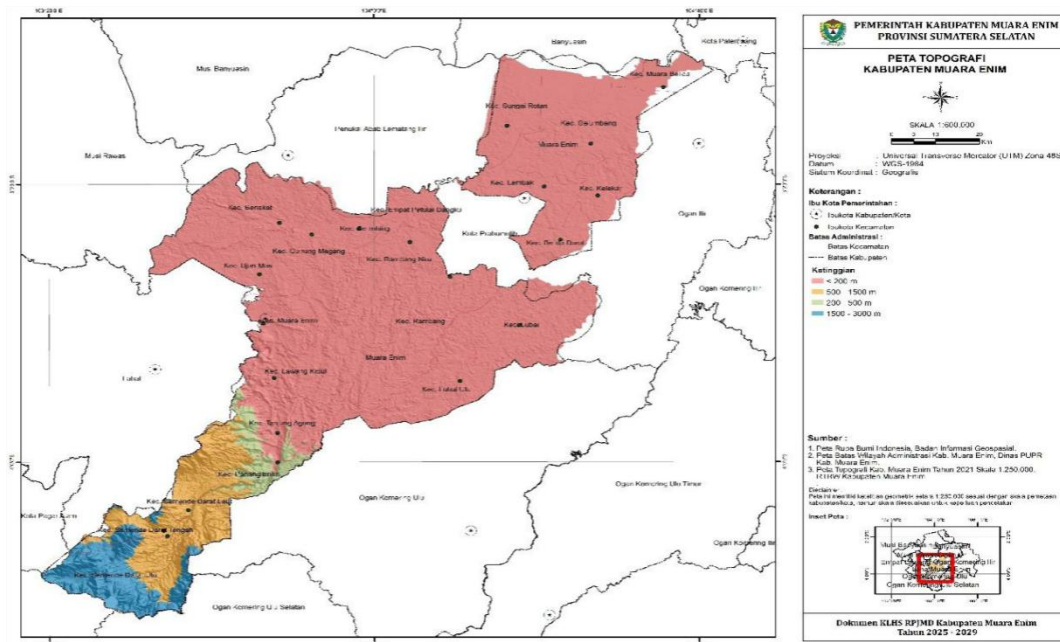
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2023

Kecamatan Gelumbang merupakan wilayah kecamatan yang paling luas dengan luas wilayah 705,57 km² atau 9,43 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Lembak dengan luas wilayah 101,44 km² atau 1,36 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Gelumbang dengan jumlah 23 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Benakat dengan jumlah 6 desa.



A. Topografi

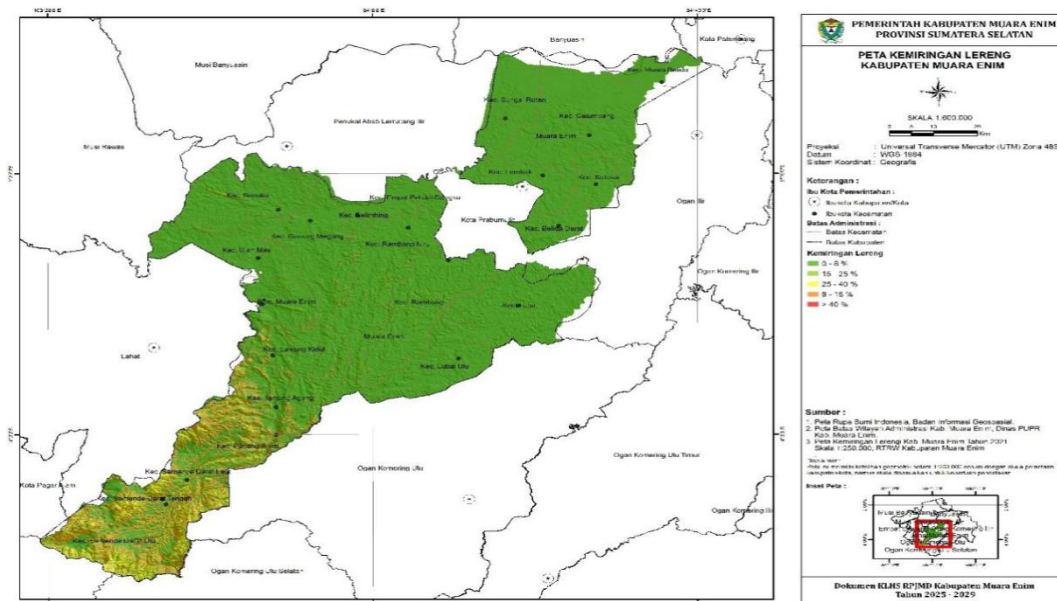
Kabupaten Muara Enim terdiri dari berbagai kecamatan yang memiliki karakteristik topografi berbeda, tercermin dari variasi elevasi di setiap wilayah. Topografi Kabupaten Muara Enim memiliki variasi bentang alam yang beragam, mencakup dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Muara Enim

Gambar 0.2
Peta Topografi Kabupaten Muara Enim

Secara umum, wilayah Kabupaten Muara Enim memiliki karakteristik geografi yang berhubungan dengan aliran Sungai Lematang dan Sungai Enim, yaitu dua sungai besar yang mengalir melalui Kabupaten Muara Enim. Wilayah di sekitar aliran sungai, banyak yang berupa dataran rendah dengan ketinggian yang tidak terlalu signifikan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muara Enim berada di dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang mencakup 77,22 persen dari luas wilayah. Namun di bagian barat dan selatan, topografinya berubah menjadi perbukitan dan pegunungan yang lebih tinggi.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Muara Enim

Gambar 0.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Muara Enim

Topografi Kabupaten Muara Enim cukup beragam dengan karakteristik sebagai berikut:

- Dataran Rendah. Sebagian wilayah di bagian timur dan tengah Kabupaten Muara Enim merupakan dataran rendah yang relatif landai. Daerah ini lebih cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan pemukiman.
- Perbukitan. Wilayah di bagian barat dan tengah Kabupaten Muara Enim merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi. Perbukitan ini umumnya dimanfaatkan untuk perkebunan, seperti karet, sawit, dan kopi.
- Pegunungan. Wilayah pegunungan berada di bagian barat Kabupaten Muara Enim, dengan ketinggian yang lebih tinggi dan medan yang lebih terjal. Bagian ini memiliki hutan yang lebat dan menjadi sumber mata air serta ekosistem yang penting.

Karakteristik topografi yang bervariasi tersebut mempengaruhi pola penggunaan lahan, pola pemukiman, serta kondisi iklim mikro di tiap kecamatan. Wilayah dengan elevasi rendah lebih rentan terhadap banjir, terutama di musim hujan. Wilayah dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Sebaliknya, wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi cenderung lebih sejuk dan memiliki potensi lebih besar untuk pengembangan pariwisata alam, seperti di kawasan pegunungan atau perbukitan. Selain itu, area berbukit dan pegunungan banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, kehutanan, dan aktivitas penambangan batu bara yang merupakan salah satu industri utama di Kabupaten Muara Enim.

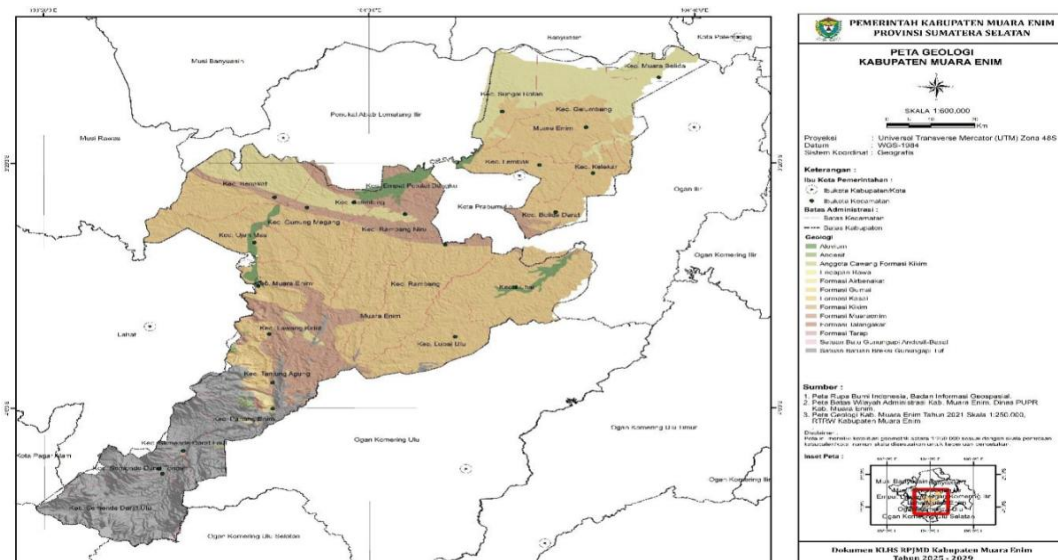


Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Muara Enim juga bervariasi, di mana sekitar 75,7 persen wilayahnya memiliki kemiringan lereng kurang dari 12 derajat, sementara 14 persen wilayahnya memiliki kemiringan lereng lebih dari 40 derajat, yang terutama berada di daerah pegunungan. Kemiringan lereng di dataran rendah berkisar antara 0-3 persen, sedangkan kemiringan di wilayah perbukitan lebih bervariasi, yaitu 3-15 persen di lereng yang landai, dan bisa mencapai 15-40 persen di daerah yang lebih curam. Kemiringan lereng di daerah pegunungan dapat mencapai lebih dari 40 persen.

B. Geologi

Setiap daerah memiliki karakteristik geologi yang unik, yang dipengaruhi oleh sejarah tektoniknya, dan hal ini penting dalam eksplorasi sumber daya alam, seperti minyak, gas, batubara, atau mineral berharga lainnya. Di wilayah Kabupaten Muara Enim, struktur geologi memainkan peran kunci dalam distribusi sumber daya batubara dan hidrokarbon yang signifikan.

Wilayah Kabupaten Muara Enim terdiri dari struktur lipatan dan patahan yang mempengaruhi distribusi cadangan batubara dan sumber daya alam lainnya di bawah permukaan. Struktur lipatan ini adalah hasil dari tekanan tektonik yang terjadi selama periode Tersier, di mana cekungan Sumatera Selatan terbentuk. Kondisi geologi yang kaya akan sumber daya alam, khususnya batubara, membuat Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu pusat industri pertambangan di Sumatera Selatan.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Muara Enim

Gambar 0.4
Peta Geologi Kabupaten Muara Enim



Formasi geologi di Kabupaten Muara Enim memiliki lapisan batuan yang bervariasi dan kaya akan sumber daya alam, terutama batubara. Berikut beberapa formasi geologi utama yang membentuk wilayah Kabupaten Muara Enim, yaitu:

- a Formasi Muara Enim, merupakan formasi geologi yang dominan di wilayah ini dan mengandung cadangan batubara terbesar. Formasi ini terdiri dari batuan sedimen yang terbentuk pada zaman Miosen hingga Pliosen. Lapisan batubara di formasi ini merupakan salah satu yang paling signifikan secara ekonomi di Indonesia.
- b Formasi Air Benakat, formasi ini juga ditemukan di beberapa bagian wilayah Kabupaten Muara Enim. Formasi ini terdiri dari batuan sedimen yang mengandung batu pasir dan serpih, yang juga menyimpan potensi minyak dan gas bumi.
- c Formasi Kasai, ditemukan di bagian selatan wilayah Kabupaten Muara Enim. Formasi Kasai mengandung batuan karbonat dan batuan vulkanik yang lebih tua.
- d Formasi Talang Akar, juga ditemukan di wilayah Kabupaten Muara Enim, terdiri dari batuan sedimen marin dan fluvial. Formasi ini mengandung sumber minyak bumi dan gas yang sering menjadi target eksplorasi.

Secara keseluruhan, formasi-formasi tersebut mendukung potensi besar Kabupaten Muara Enim sebagai daerah penghasil batubara serta memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang penting bagi perekonomian daerah tersebut.

C. Hidrologi

Sistem hidrologi di Kabupaten Muara Enim ditandai oleh aliran sungai-sungai besar dan anak sungai yang berperan penting dalam penyediaan air untuk keperluan pertanian, perikanan, industri, serta kebutuhan domestik masyarakat. Sungai Lematang merupakan sungai utama di Kabupaten Muara Enim, yang mengalir dari pegunungan di wilayah barat daya hingga ke timur laut. Sungai Lematang menjadi sumber air yang penting untuk irigasi lahan pertanian serta sebagai jalur transportasi.

Selain itu, terdapat beberapa anak sungai yang mengalir ke Sungai Lematang, seperti Sungai Enim, yang juga memiliki fungsi hidrologi penting di kawasan ini. Beberapa cekungan air dan waduk alami terbentuk di sekitar aliran sungai, yang berfungsi sebagai cadangan air di musim kemarau dan membantu pengendalian banjir di musim hujan, khususnya di wilayah dataran rendah. Keberadaan danau dan rawa-rawa di daerah ini juga mendukung keanekaragaman hayati.



Sistem irigasi di Kabupaten Muara Enim memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian yang merupakan bagian vital dari perekonomian lokal. Dengan kondisi topografi yang bervariasi dan curah hujan yang cukup tinggi, pengelolaan sumber daya air untuk irigasi menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian. Irigasi di Kabupaten Muara Enim umumnya bergantung pada sungai-sungai utama seperti Sungai Lematang dan Sungai Enim, serta jaringan saluran irigasi yang dibangun untuk mendistribusikan air ke lahan pertanian. Sistem ini membantu memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Sistem hidrologi di Kabupaten Muara Enim juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan, terutama pertambangan batu bara yang merupakan industri utama di daerah ini. Aktivitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air di wilayah ini menjadi krusial, terutama dengan adanya aktivitas pertambangan yang intensif.

Salah satu dampak terbesar dari limbah pertambangan batu bara yaitu pencemaran air. Air asam tambang (acid mine drainage) yang terbentuk dari reaksi kimia antara batuan sulfida dengan air dan udara dapat menurunkan pH air dan melepaskan logam berat beracun, yang membahayakan kehidupan akuatik dan kualitas air bagi masyarakat. Limbah ini dapat mencemari sungai dan cekungan air, berdampak negatif pada kualitas air yang digunakan untuk keperluan domestik dan pertanian. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem perairan dan mengurangi keanekaragaman hayati.

Aktivitas penggalian yang dilakukan dalam pertambangan batu bara juga dapat mengubah pola aliran air. Perubahan ini berisiko meningkatkan banjir di daerah sekitar karena aliran yang tidak teratur. Selain itu, aktivitas pertambangan dapat mengganggu keberadaan air tanah, yang mengakibatkan penurunan ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian. Sumber daya air tanah juga berperan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan air permukaan.

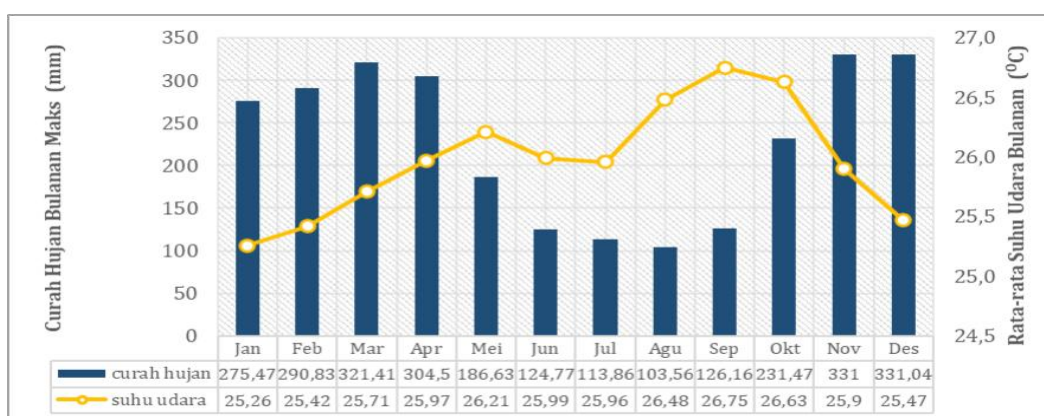
Penggalian tanah juga menyebabkan erosi yang lebih tinggi, mengakibatkan sedimentasi di sungai-sungai dan badan air. Sedimen yang terakumulasi dapat mengurangi kapasitas aliran air, yang berpotensi meningkatkan risiko banjir serta mempengaruhi kualitas air yang tersedia. Risiko banjir dan erosi juga menjadi tantangan besar, terutama dengan perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan sumber daya air.



Secara keseluruhan, sistem hidrologi di Kabupaten Muara Enim tidak hanya mendukung kehidupan masyarakat, tetapi juga memainkan peran integral dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya air diperlukan untuk mencegah permasalahan seperti banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, sehingga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat dapat terjaga. Pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya air tetap tersedia dan berkualitas tinggi untuk generasi mendatang.

D. Klimatologi

Iklim menunjukkan karakteristik cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Karakteristik iklim didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi curah hujan, suhu, dan angin atau penguapan. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut.



Sumber: KLHS Kabupaten Muara Enim

Gambar 0.5
Curah Hujan Bulanan Maksimum dan Rata-rata Suhu Udara

Curah hujan bulanan di Kabupaten Muara Enim cukup bervariasi setiap tahunnya, dengan curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan-bulan musim hujan, dan curah hujan yang relatif rendah terjadi pada musim kemarau. Curah hujan bulanan maksimum yang tercatat dalam rentang waktu tahun 2011 hingga 2023 berada pada kisaran 103,56 hingga 331,04 mm per bulan. Intensitas hujan yang relatif tinggi terjadi di periode bulan November hingga April, sedangkan intensitas hujan terendah terjadi pada musim kemarau, yakni pada periode bulan Mei hingga Oktober. Kabupaten Muara Enim berada di wilayah beriklim tropis basah, yang



ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara rata-rata per bulan sepanjang tahun 2011-2023 berkisar antara 25,26°C hingga 26,75°C. Suhu udara rata-rata per bulan yang terendah pada rentang waktu tahun 2011 hingga 2023 terjadi di Bulan Januari, sedangkan suhu udara rata-rata per bulan yang tertinggi terjadi pada Bulan September.

2.2 Demografi dan Ketenagakerjaan

2.2.1 Demografi

Aspek demografis merupakan salah satu elemen fundamental dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu wilayah atau negara. Karakteristik demografi seperti jumlah penduduk, pertumbuhan populasi, struktur umur, rasio ketergantungan, migrasi, dan distribusi geografis menentukan kebutuhan dasar dan arah kebijakan pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Tabel 0.2
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Sex Ratio
1	Semende Darat Laut	15.803	2,42	58,72	102
2	Semende Darat Ulu	18.782	2,87	44,02	106
3	Semende Darat Tengah	11.598	1,77	38,37	106
4	Tanjung Agung	30.499	4,67	58,98	105
5	Panang Enim	13.449	2,06	69,71	108
6	Rambang	29.180	4,46	77,18	104
7	Lubai	28.010	4,28	52,92	105
8	Lubai Ulu	35.128	5,37	73,41	109
9	Lawang Kidul	77.987	11,93	271,49	103
10	Muara Enim	82.415	12,61	440,53	102
11	Ujan Mas	27.324	4,18	87,82	106
12	Gunung Megang	36.311	5,55	77,03	105
13	Benakat	10.732	1,64	23,75	109
14	Belimbing	27.194	4,16	182,89	105
15	Rambang Niru	35.671	5,46	56,18	104
16	Empat Petulai Dangku	20.694	3,17	149,58	104
17	Gelumbang	65.032	9,95	92,17	104
18	Lembak	20.103	3,08	198,18	100
19	Sungai Rotan	33.889	5,18	98,47	103
20	Muara Belida	8.430	1,29	41,19	108



No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Sex Ratio
21	Kelekar	11.874	1,82	86,02	106
22	Belida Darat	13.626	2,08	51,56	106
Kab. Muara Enim		653.731	100,00	87,36	104

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2025

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 yang disajikan dalam tabel, jumlah total penduduk mencapai 653.731 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 87,36 jiwa per km². Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Muara Enim dengan 82.415 jiwa (12,61% dari total populasi), diikuti oleh Lawang Kidul dengan 77.987 jiwa (11,93%). Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Muara Belida dengan 8.430 jiwa (1,29%), serta Belida Darat dengan 13.626 jiwa (2,08%).

Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Muara Enim memiliki kepadatan tertinggi, yaitu 440,53 jiwa per km², diikuti oleh Rambang Niru (150,58 jiwa/km²) dan Empat Petulai Dangku (149,58 jiwa/km²). Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Benakat dengan 23,75 jiwa/km², diikuti oleh Semende Darat Tengah dengan 38,37 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan pusat ekonomi dan aktivitas industri, seperti Muara Enim dan Lawang Kidul, cenderung memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih rural dan terpencil.

Dalam hal distribusi persentase penduduk, sebagian besar kecamatan memiliki kontribusi di bawah 5% terhadap total populasi kabupaten, dengan pengecualian pada Muara Enim dan Lawang Kidul yang secara signifikan menyumbang bagian besar dari total penduduk. Kecamatan-kecamatan dengan persentase penduduk di bawah 2% antara lain Benakat (1,64%), Semende Darat Tengah (1,77%), dan Belida Darat (2,08%).

Dari sisi rasio jenis kelamin (*sex ratio*), terdapat kecenderungan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan di hampir seluruh kecamatan. Rata-rata *sex ratio* Kabupaten Muara Enim adalah 104, yang berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kecamatan dengan *sex ratio* tertinggi adalah Semende Darat Ulu dan Semende Darat Tengah (106), sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Lawang Kidul (102).

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk di wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi dan industri yang lebih besar, sementara kecamatan-kecamatan yang lebih rural cenderung memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih rendah.



Tabel 0.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Muara Enim, 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	23.914	22.385	46.299
5-9	30.893	28.847	59.740
10-14	32.437	30.392	62.829
15-19	26.542	25.273	51.815
20-24	28.966	27.158	56.124
25-29	26.221	24.020	50.241
30-34	24.649	23.415	48.064
35-39	26.665	25.879	52.544
40-44	25.384	24.644	50.028
45-49	22.702	22.242	44.944
50-54	18.673	18.029	36.702
55-59	15.250	15.512	30.762
60-64	12.113	12.184	24.297
65-69	8.729	8.459	17.188
70-74	5.538	5.499	11.037
75+	4.884	6.233	11.117
	333.560	320.171	653.731

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, 2025

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 menurut kelompok umur dan jenis kelamin, terlihat bahwa komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Jumlah penduduk dalam kelompok ini mencapai lebih dari 65% dari total populasi, dengan kelompok usia terbesar berada pada rentang 10-14 tahun (62.829 jiwa) dan 5-9 tahun (59.740 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar di masa depan, dengan jumlah penduduk usia muda yang cukup tinggi.

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga terlihat cukup merata dalam distribusinya, dengan jumlah laki-laki umumnya lebih banyak dibandingkan perempuan dalam setiap kelompok usia. Namun, pada kelompok usia 75 tahun ke atas, jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (6.233 dibandingkan 4.884 jiwa). Fenomena ini konsisten dengan tren demografi global, di mana perempuan cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

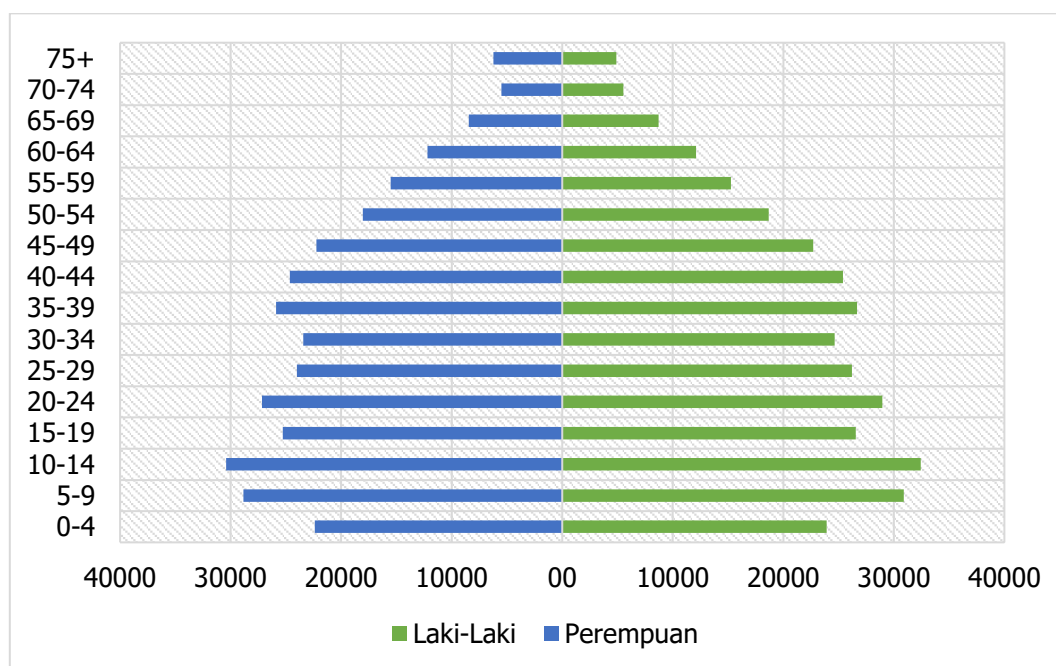
Kelompok usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) juga masih cukup signifikan. Kelompok usia 0-14 tahun mencapai lebih dari 30% dari total penduduk, menunjukkan angka kelahiran yang masih cukup tinggi. Sementara itu, kelompok lansia (65



tahun ke atas) mencapai sekitar 6% dari populasi, yang mengindikasikan mulai adanya penuaan populasi, meskipun masih dalam tahap awal.

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2024, pola distribusi penduduk menunjukkan bentuk yang menyerupai piramida ekspansif. Piramida ini ditandai dengan dasar yang lebar, yang mencerminkan tingginya jumlah penduduk pada kelompok usia muda (0-14 tahun), serta puncak yang semakin mengecil pada kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas). Karakteristik ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim masih berada dalam fase pertumbuhan penduduk yang tinggi, didukung oleh tingkat kelahiran yang masih cukup besar.

Komposisi penduduk yang dominan pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) menunjukkan bahwa daerah ini memiliki bonus demografi, yang dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan ekonomi jika dikelola dengan baik. Proporsi penduduk usia produktif yang tinggi memungkinkan adanya tenaga kerja yang besar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan yang perlu diantisipasi adalah penyediaan lapangan kerja yang memadai serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.



Sumber: Hasil Analisis Data BPS Kabupaten Muara Enim (2024)

Gambar 0.6
Piramida Penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



Dari perspektif gender, piramida ini juga menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan di hampir semua kelompok usia, kecuali pada kelompok usia lanjut (70 tahun ke atas), dimana jumlah perempuan lebih banyak. Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki secara keseluruhan, piramida penduduk ini mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga menuntut kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengoptimalkan bonus demografi dan mengantisipasi tantangan kependudukan di masa depan.

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 sebanyak 611.130 Jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi (2025-2045), maka jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim diproyeksikan mencapai 647.940 Jiwa pada tahun 2025, sebanyak 679.910 Jiwa pada tahun 2030, dan menjadi sebanyak 708.000 orang pada tahun 2035.

2.2.2 Ketenagakerjaan

A. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan. Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan untuk mewujudkan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan sejahtera. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja tetapi sedang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka hanya menghitung orang yang secara aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu (biasanya seminggu terakhir dalam survei tenaga kerja).

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Provinsi Sumatera Selatan	3,86	4,98	4,63	4,11	3,86
Kabupaten Muara Enim	4,90	5,03	4,12	3,92	4,09

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif namun secara umum bergerak menurun, sejalan dengan tren nasional dan provinsi. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 4,90%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan (3,86%) namun



jauh di bawah angka nasional (7,07%) yang saat itu masih terdampak oleh pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, TPT Muara Enim meningkat menjadi 5,03%, mengikuti tren kenaikan di tingkat provinsi (4,98%) dan mencerminkan perlambatan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, angka pengangguran di Muara Enim menunjukkan penurunan yang konsisten, yakni menjadi 4,12% pada 2022, 3,92% pada 2023, dan 4,09% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan penciptaan lapangan kerja di tingkat daerah, meskipun sedikit mengalami kenaikan kembali di tahun 2024.

Jika dibandingkan secara regional dan nasional, TPT Muara Enim secara konsisten berada di bawah angka nasional, yang menunjukkan kinerja daerah dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Namun, dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan, TPT Muara Enim lebih tinggi hingga tahun 2022, dan baru setara pada tahun 2024, yaitu sama-sama di angka 3,86%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional Kabupaten Muara Enim cukup baik, masih ada ruang perbaikan dalam hal penguatan sektor ketenagakerjaan, terutama dalam menciptakan pekerjaan produktif bagi penduduk usia kerja. Penurunan TPT juga menandai semakin adaptifnya perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja, yang bisa didorong lebih lanjut melalui peningkatan investasi, pengembangan UMKM, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk penerapan dan pencapaian Standar Minimal (SPM) urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan peran serta perempuan di dalam pembangunan daerah serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

C. Keterlibatan Perempuan Di Parlemen

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia dengan memperhatikan kesetaraan gender, yang dikembangkan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu dimensi penting dalam IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, yang menjadi ukuran representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Dimensi ini mengukur persentase



perempuan yang menduduki kursi di lembaga legislatif (parlemen), baik di tingkat nasional (DPR) maupun daerah (DPRD). Keterwakilan perempuan di parlemen penting karena memberikan peluang bagi perempuan untuk: (1) Mengadvokasi kebijakan yang sensitif gender; (2) Memastikan kebutuhan perempuan diakomodasi dalam kebijakan publik; dan (3) Mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Berdasarkan rekomendasi dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dan Beijing Platform for Action (1995), idealnya keterwakilan perempuan di parlemen minimal mencapai 30% untuk dapat memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan publik.

Tabel 0.4
Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Muara Enim	15,56	17,78	15,56	15,56	15,56
Provinsi Sumatera Selatan	21,62	21,33	21,33	24,00	24,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 0.4 memperlihatkan data keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024 yang menjadi indikator penting dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam ranah pengambilan keputusan politik. Indikator ini juga menjadi bagian dari pemantauan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada Target 5.5, yaitu memastikan partisipasi penuh dan setara perempuan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan publik.

Di Kabupaten Muara Enim, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen tercatat masih stagnan pada angka 15,56 persen untuk tiga tahun, yakni pada 2020, 2022, dan 2024, sementara pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 17,78 persen. Fluktuasi yang minim dan capaian yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa representasi perempuan belum mencapai ambang minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan KPU tentang pencalonan legislatif.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, capaian Kabupaten Muara Enim masih tertinggal cukup jauh. Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, mampu mempertahankan keterlibatan perempuan di parlemen di atas 21 persen bahkan mencapai 24 persen pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa di tingkat kabupaten, masih terdapat



hambatan struktural maupun kultural yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik, baik dari aspek pencalonan, elektabilitas, maupun dukungan partai politik.

Dari sisi kebijakan, perlu ada penguatan afirmasi dan strategi pemberdayaan politik perempuan secara sistematis. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, edukasi politik di tingkat komunitas, serta dukungan kelembagaan dari partai dan penyelenggara pemilu agar memberikan ruang yang lebih setara bagi perempuan untuk mencalonkan diri dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik. Di saat yang sama, penting pula untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen bukan hanya soal representasi simbolik, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan sosial

D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merujuk pada keterlibatan perempuan usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas) dalam pasar tenaga kerja, baik dalam bentuk bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Indikator ini menjadi penting dalam menilai kontribusi perempuan terhadap perekonomian dan menggambarkan sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan untuk bekerja.

Tabel 0.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	80,99	83,65	85,94	86,62	85,79
Perempuan	55,63	55,18	58,85	58,86	55,35

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 0.5 menampilkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024. TPAK mengukur persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dan menjadi indikator penting dalam menilai pemanfaatan potensi tenaga kerja di suatu wilayah.

Secara umum, tingkat partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja tercatat tinggi dan cenderung meningkat, dari 80,99 persen pada tahun 2020 menjadi 85,79 persen pada tahun 2024, dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar 86,62 persen. Data ini menunjukkan bahwa laki-laki di Kabupaten Muara Enim memiliki kecenderungan tinggi untuk terlibat dalam



aktivitas ekonomi, mencerminkan pola tradisional dalam struktur pasar kerja yang masih didominasi oleh laki-laki.

Sebaliknya, tingkat partisipasi perempuan berada pada kisaran yang lebih rendah dan relatif fluktuatif, yakni 55,63 persen pada 2020, sempat meningkat hingga 58,86 persen pada 2023, namun kembali menurun menjadi 55,35 persen di tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan partisipasi di dunia kerja. Penurunan partisipasi perempuan pada 2024 dapat mencerminkan sejumlah faktor, seperti tanggung jawab domestik yang belum setara, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, atau rendahnya dukungan terhadap perempuan dalam sektor informal dan kewirausahaan.

Kesenjangan partisipasi ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif dan responsif gender, seperti penyediaan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar bagi perempuan, penguatan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan, peningkatan akses terhadap layanan penitipan anak dan fasilitas ramah gender di tempat kerja, serta promosi kewirausahaan perempuan berbasis komunitas. Upaya ini penting untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kontribusi perempuan secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah.

2.3 Perbandingan Regional

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara. IPM tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Indikator ini dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat.

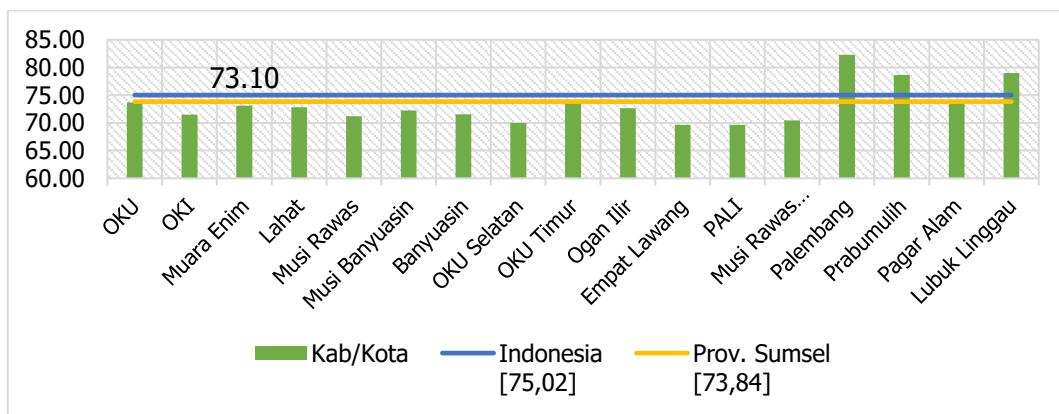
Tabel 0.6
Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil Long Form SP2020)
Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
Provinsi Sumatera Selatan	71,62	71,83	72,48	73,18	73,84
Kabupaten Muara Enim	70,84	70,95	71,52	72,33	73,10

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024



Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dalam kualitas pembangunan manusia di daerah ini. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 70,84, mengalami kenaikan bertahap menjadi 70,95 pada tahun 2021, 71,52 pada tahun 2022, 72,33 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 73,1 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Kabupaten Muara Enim.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 0.7
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil Long Form SP2020)
Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Berdasarkan posisi relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, terlihat bahwa IPM Kabupaten Muara Enim mencapai 73,10. Angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (73,84) dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (75,02). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Muara Enim, masih terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki agar sejajar dengan provinsi dan nasional.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim memiliki IPM yang berada di level menengah, di mana beberapa daerah seperti Palembang dan Lubuk Linggau memiliki IPM lebih tinggi, sementara beberapa daerah seperti Musi Rawas dan OKU Selatan memiliki IPM lebih rendah. Tingginya IPM di daerah perkotaan seperti Palembang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup lebih baik dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan.



B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja tetapi sedang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka hanya menghitung orang yang secara aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu (biasanya seminggu terakhir dalam survei tenaga kerja).

Tabel 0.7
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Provinsi Sumatera Selatan	3,86	4,98	4,63	4,11	3,86
Kabupaten Muara Enim	4,90	5,03	4,12	3,92	4,09

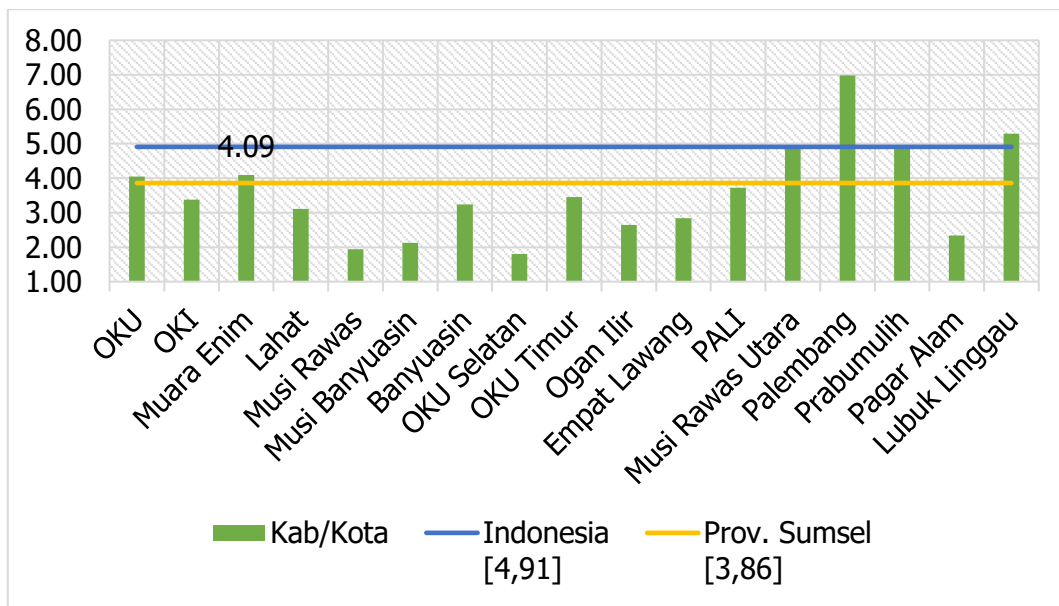
Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan Tabel 0.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Muara Enim tahun 2019–2024, terlihat bahwa TPT di Kabupaten Muara Enim berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir, meskipun pada tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 4,90%, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,03%, yang kemungkinan merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, angka TPT terus menunjukkan perbaikan, yakni menurun menjadi 5,03% di tahun 2021, hingga mencapai 3,92% pada tahun 2023 dan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,09%.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, TPT Kabupaten Muara Enim relatif lebih tinggi pada tahun 2020 dan 2021, namun sejak tahun 2022 hingga 2024, perbedaan antara keduanya semakin menyempit. Bahkan, pada tahun 2024, TPT Kabupaten Muara Enim (4,09%) hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan provinsi (3,86%), mencerminkan peningkatan efektivitas dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan angka nasional, Kabupaten Muara Enim berada pada posisi yang lebih baik, di mana TPT nasional masih berada di angka 4,91% pada tahun 2024, lebih tinggi dari Kabupaten Muara Enim.



Berdasarkan posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, terlihat bahwa TPT Kabupaten Muara Enim sebesar 4,09%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (3,86%), namun masih lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional (4,91%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Muara Enim memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi, masih ada tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 0.8
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim berada pada tingkat pengangguran menengah, di mana beberapa daerah seperti Palembang dan Prabumulih memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi, sedangkan daerah seperti Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu Selatan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Palembang sebagai pusat ekonomi utama provinsi memiliki TPT tertinggi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh urbanisasi dan tingginya jumlah pencari kerja yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja.



C. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2024, terlihat adanya tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp390.342, kemudian meningkat menjadi Rp405.782 pada tahun 2021, Rp426.216 pada tahun 2022, Rp467.396 pada tahun 2023, hingga mencapai Rp491.107 pada tahun 2024. Peningkatan garis kemiskinan ini mengindikasikan bahwa standar minimum pengeluaran yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar juga meningkat, yang dapat disebabkan oleh inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Meskipun peningkatan garis kemiskinan bisa menjadi indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat karena daya beli masyarakat meningkat, namun hal ini juga dapat menjadi tanda bahwa biaya hidup di Kabupaten Muara Enim mengalami kenaikan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan kenaikan garis kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin dapat meningkat karena semakin banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan dasar tersebut.

Tabel 0.8
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Muara Enim	79,27	80,40	73,53	73,24	66,42
Prov. Sumatera Selatan	1081,59	1113,76	1044,69	1045,68	984,24
Proporsi	7,33	7,22	7,04	7,00	6,75

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2024, terlihat adanya tren penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 79,27 ribu jiwa, mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 80,40 ribu jiwa, sebelum menurun signifikan menjadi 73,53 ribu jiwa pada tahun 2022, 73,24 ribu jiwa pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 66,42 ribu jiwa pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan yang lebih baik. Pada tingkat provinsi, jumlah penduduk miskin turun dari 1.081,59 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 984,24 ribu jiwa pada tahun 2024. Secara proporsi, kontribusi Kabupaten Muara Enim terhadap total penduduk



miskin di provinsi juga mengalami penurunan dari 7,33% pada tahun 2020 menjadi 6,75% pada tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi di daerah ini.

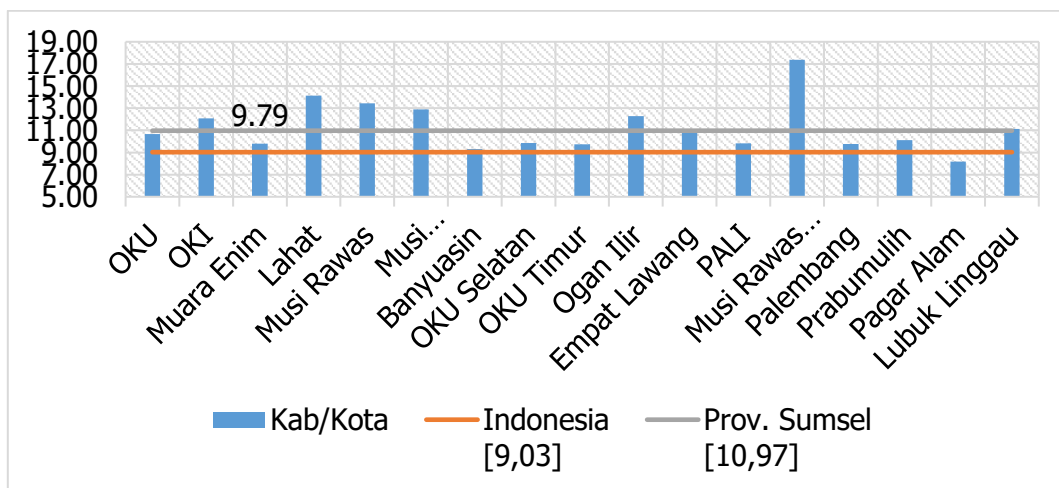
Tabel 0.9
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03
Provinsi Sumatera Selatan	12,66	12,84	11,90	11,78	10,97
Kabupaten Muara Enim	12,32	12,32	11,12	10,93	9,79

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2024, terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim sebesar 12,32%, dan tetap sama pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 mulai mengalami penurunan menjadi 11,12%, kemudian turun lagi menjadi 10,93% pada tahun 2023, hingga akhirnya mencapai 9,79% pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan Kabupaten Muara Enim berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, yang tercatat sebesar 12,66% pada tahun 2020 dan mengalami penurunan bertahap hingga 10,97% pada tahun 2024. Demikian pula jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional, Kabupaten Muara Enim memiliki tingkat kemiskinan yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, yang pada tahun 2020 berada di angka 10,19% dan terus menurun hingga 9,03% pada tahun 2024.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 0.9
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Berdasarkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Muara Enim sebesar 9,79%, berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (10,97%) dan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (9,03%). Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di provinsi tersebut, tetapi masih sedikit di atas standar nasional. Dari grafik terlihat bahwa Musi Rawas Utara memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, jauh di atas Kabupaten Muara Enim, sedangkan Pagar Alam memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah.

2.4 Analisis Kesiapan Daerah

2.4.1 Kondisi Kerawanan Bencana Wilayah

Kabupaten Muara Enim memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama disebabkan oleh faktor geografis dan iklim setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim mencatat bahwa terdapat beberapa jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, antara lain bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin kencang dan puting beliung.

A. Risiko Bencana Banjir

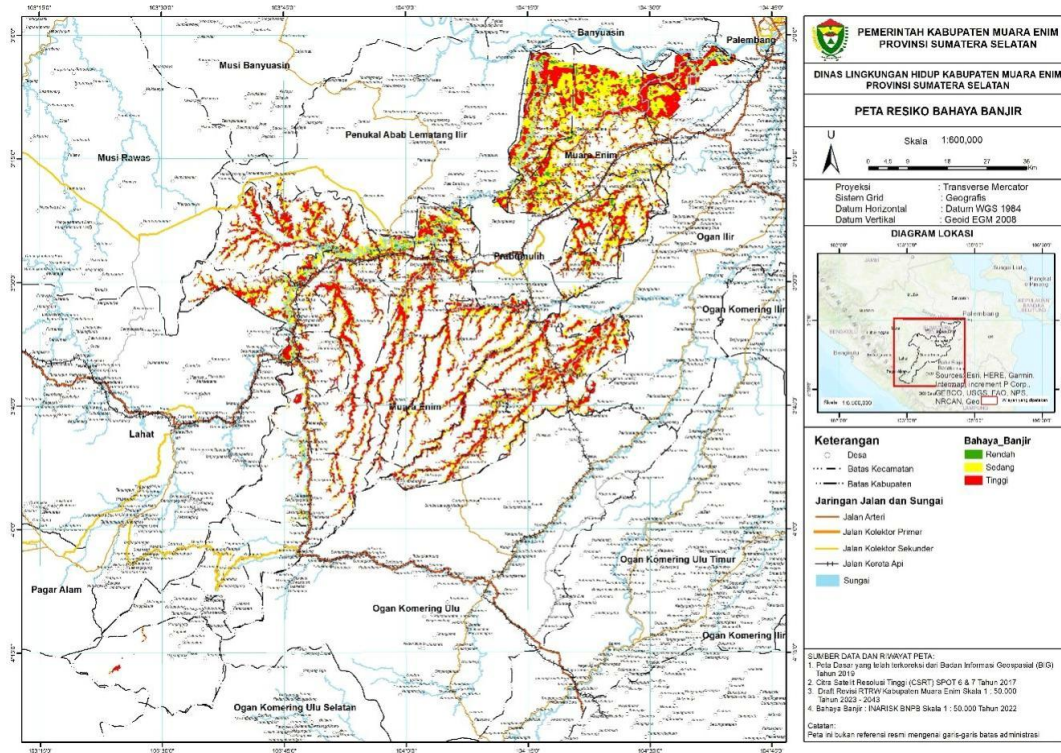
Bencana banjir di Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu ancaman yang sering terjadi, terutama pada musim penghujan. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan tinggi, topografi daerah yang memiliki banyak sungai, serta kurangnya drainase yang baik di beberapa kawasan.

Kabupaten Muara Enim dilewati oleh beberapa sungai besar, seperti Sungai Enim dan Sungai Lematang. Daerah-daerah di sekitar sungai ini rentan mengalami banjir, terutama saat curah hujan tinggi di musim penghujan. Luapan air sungai tersebut membanjiri pemukiman dan lahan pertanian di sekitarnya. Beberapa Kawasan di

Kabupaten Muara Enim tidak memiliki infrastruktur drainase yang memadai, sehingga menyebabkan genangan air dengan cepat berubah menjadi banjir selama hujan deras. Selain itu, perubahan penggunaan lahan seperti Penggundulan hutan untuk perkebunan dan pertambangan memperburuk situasi banjir karena berkurangnya daerah resapan air. Lahan



yang tidak mampu menyerap air dengan baik meningkatkan volume air yang mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045

Gambar 0.10
Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Muara Enim

Banjir di Kabupaten Muara Enim berdampak besar pada kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Banjir mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Banjir juga mengganggu aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian. Selain itu, banjir mengakibatkan kurangnya akses penduduk ke air bersih dan sanitasi, sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat.

Wilayah yang paling rentan terkena banjir di Kabupaten Muara Enim yaitu daerah-daerah di sepanjang aliran Sungai Lematang dan Sungai Enim, terutama di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Belimbing, dan Kecamatan Lawang Kidul.



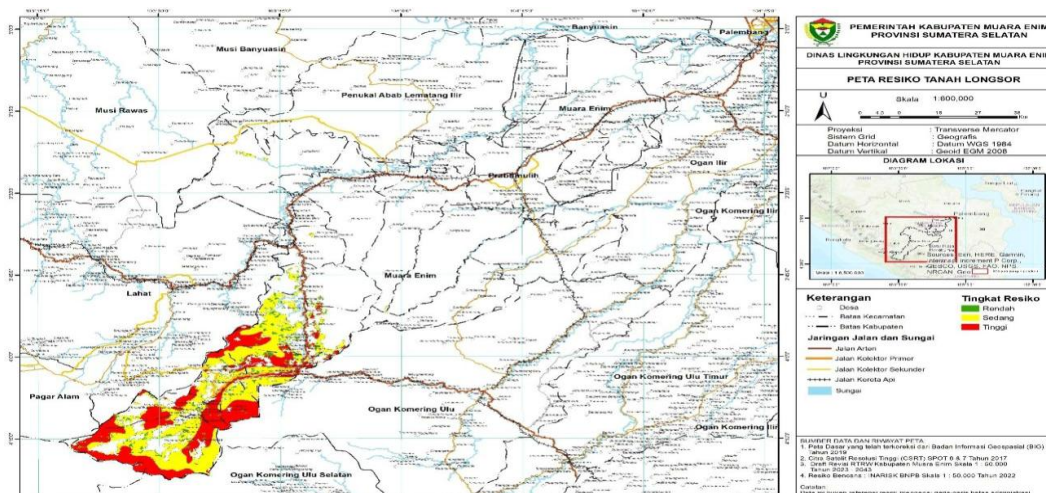
B. Risiko Bencana Longsor

Tanah longsor di Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu bencana alam yang cukup sering terjadi, terutama di wilayah yang memiliki kemiringan tanah yang curam dan curah hujan tinggi. Beberapa faktor utama penyebab tanah longsor di daerah ini meliputi kondisi geografis, perubahan penggunaan lahan, dan intensitas hujan yang tinggi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Muara Enim terdiri dari perbukitan dan lereng yang rentan mengalami longsor. Daerah-daerah dengan kemiringan tanah yang curam menjadi lokasi utama kejadian tanah longsor. Kegiatan seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan, atau perkebunan tanpa disertai pengelolaan yang baik dapat memperburuk risiko longsor.

Struktur tanah yang rapuh di beberapa wilayah juga meningkatkan potensi longsor, terutama pada daerah yang mengalami erosi akibat curah hujan atau aktivitas manusia. Penggundulan hutan mengurangi daya ikat tanah sehingga mempermudah terjadinya longsor. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Pada musim penghujan, air hujan yang meresap ke dalam tanah menyebabkan tanah menjadi lebih berat dan tidak stabil, sehingga dapat meningkatkan risiko longsor.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang paling rawan terkena tanah longsor antara lain Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Ujan Mas, Lawang Kidul, dan Kecamatan Tanjung Agung. Wilayah-wilayah ini merupakan daerah perbukitan dengan risiko longsor yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045

Gambar 0.11

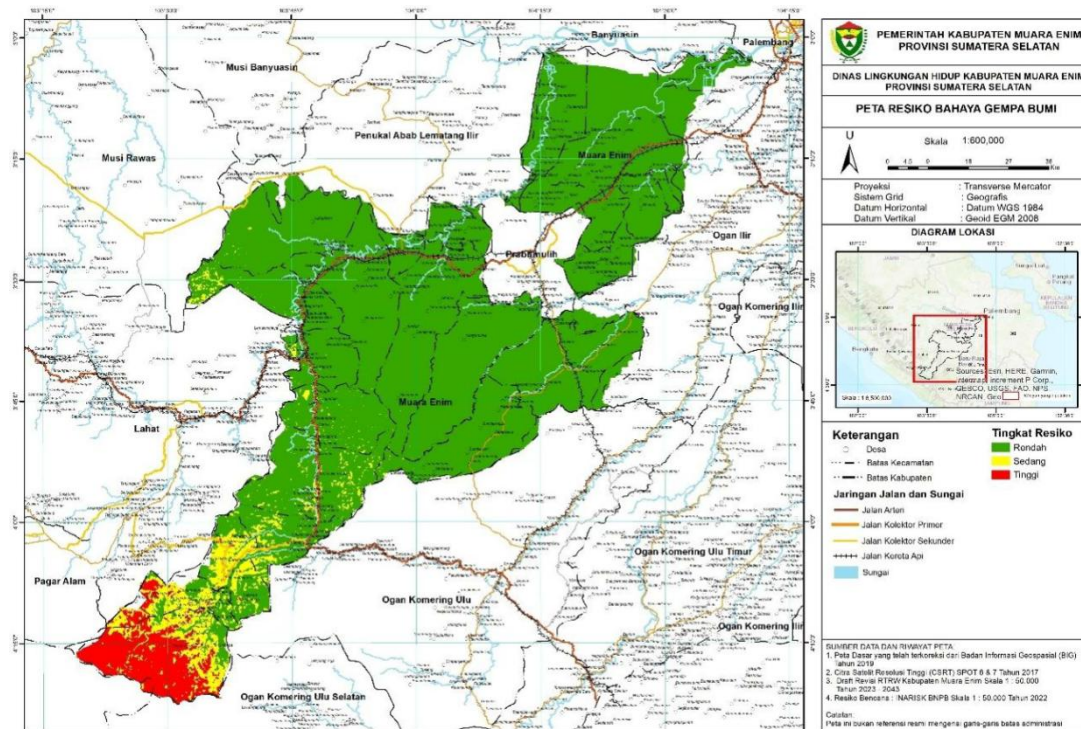
Peta Daerah Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Muara Enim



Longsor dapat menghancurkan atau merusak infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Kerusakan tersebut mengganggu transportasi dan aksesibilitas. Selain merusak infrastruktur penting, dan longsor juga merusak lahan pertanian, memaksa penduduk untuk mengungsi, bahkan juga menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh longsor juga tinggi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian di daerah rawan longsor.

C. Risiko Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Muara Enim yang terletak di Pulau Sumatera merupakan bagian dari Cincin Api Pasifik. Wilayah ini rentan terhadap aktivitas seismik karena adanya pertemuan beberapa lempeng tektonik, termasuk Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Muara Enim dapat dikategorikan sebagai ancaman serius, meskipun intensitasnya tidak tinggi seperti daerah lain yang lebih rawan gempa.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045

Gambar 0.12
Peta Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Muara Enim

Meskipun Kabupaten Muara Enim tidak tercatat memiliki gempa besar dalam waktu dekat, sejarah menunjukkan bahwa Pulau Sumatera mengalami beberapa gempa kuat yang dapat dirasakan di kabupaten ini, seperti gempa yang terjadi di Padang, Bengkulu, dan wilayah sekitarnya. Kondisi geologi daerah dapat mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap gempa.



Beberapa area mungkin memiliki tanah yang lebih labil dan tidak stabil, yang dapat meningkatkan risiko longsor atau kerusakan infrastruktur saat gempa terjadi.

Dampak gempa bumi dapat bervariasi tergantung pada kekuatan gempa, kedalaman, lokasi, dan kepadatan penduduk di daerah yang terdampak. Salah satu dampak paling signifikan dari gempa bumi adalah hilangnya nyawa manusia. Gempa bumi juga dapat merusak bangunan, jembatan, jalan, dan infrastruktur penting lainnya. Kerusakan ini mengganggu transportasi dan komunikasi, serta menghambat upaya penyelamatan dan pemulihan.

Kerugian materi dan infrastruktur yang ditimbulkan oleh gempa bumi dapat memberikan dampak negatif yang berkepanjangan pada ekonomi lokal. Biaya rehabilitasi dan rekonstruksi dapat sangat tinggi, dan aktivitas ekonomi sering kali terganggu. Jadi, dampak gempa bumi sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan.

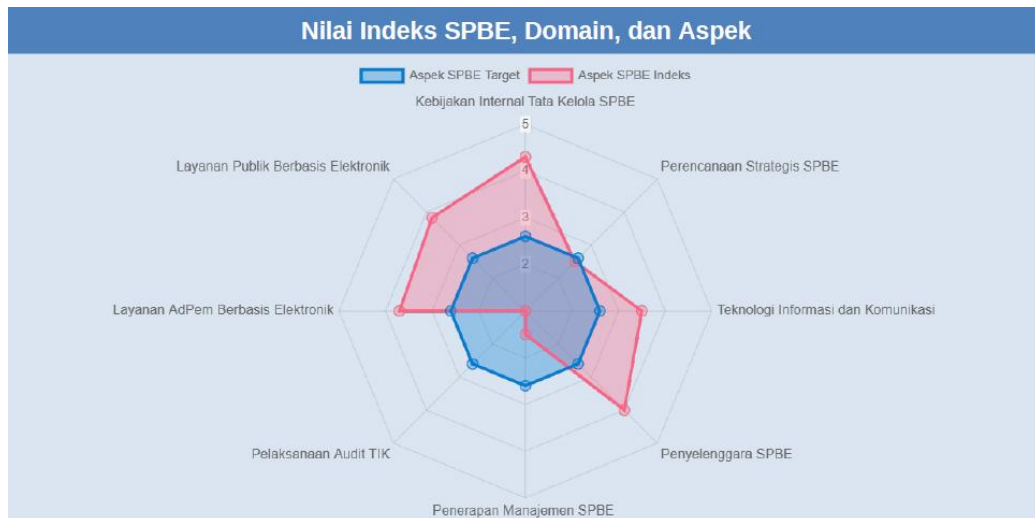
Sebagian besar gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Muara Enim adalah gempa tektonik, yang berkaitan dengan pergerakan lempeng dan aktivitas seismik di sekitar Pulau Sumatera. Meskipun tidak semua gempa menyebabkan kerusakan signifikan, namun penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana seismik di masa mendatang.

2.4.2 Kondisi Kesiapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyediakan layanan bagi penggunanya. Agar penerapannya di tingkat pusat maupun daerah berjalan secara terpadu, seluruh instansi wajib mengacu pada kerangka kerja Tata Kelola dan Manajemen SPBE. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kualitas layanan publik yang paling optimal.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim berhasil memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,29 dengan predikat Baik pada evaluasi tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam melampaui target penilaian nasional yang menetapkan indeks minimal 2,6 untuk kategori predikat tersebut. Secara keseluruhan, nilai ini didukung oleh performa tinggi pada domain Kebijakan SPBE yang mencapai skor 4,30.





Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE PANRB Kabupaten Muara Enim 2024

Gambar 0.13
Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024

Kekuatan utama SPBE di kabupaten Muara Enim terletak pada kebijakan tata kelola yang sudah sangat matang, di mana indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, dan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data telah mencapai level 5. Selain itu, daerah ini menunjukkan keunggulan dalam aspek penyelenggara SPBE dan pemanfaatan aplikasi berbagi pakai dari pusat seperti SIPD, SPSE, dan SRIKANDI. Inovasi layanan publik sektoral mandiri, seperti aplikasi PPDB online dan layanan PBB SISMIOP SIPPELE, juga menjadi poin plus karena telah terintegrasi dengan baik.

Kelemahan signifikan masih ditemukan pada aspek Pelaksanaan Audit TIK yang berada di level 1 karena belum adanya audit infrastruktur, aplikasi, maupun keamanan. Selain itu, domain Manajemen SPBE masih rendah akibat belum tersusunnya peta rencana SPBE dan proses bisnis *to-be* yang komprehensif. Kurangnya perhatian pada manajemen risiko, manajemen aset, dan manajemen perubahan menyebabkan indikator-indikator tersebut masih berada di level dasar.

2.5 Analisis Daya Saing Daerah

2.5.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan

Rasio Angka Ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tergolong tidak produktif (biasanya usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio ini menggambarkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk mendukung kelompok usia tidak produktif. Semakin tinggi angka rasio, berarti beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif semakin besar.

Tabel 0.10
Rasio Angka Ketergantungan Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Sumatera Selatan	47,09	47,27	47,49	47,23	47,24
Kabupaten Muara Enim	48,63	48,76	48,94	48,66	48,66

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 0.10, rasio angka ketergantungan di Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil namun tetap tinggi, dengan nilai berkisar antara 48,63 hingga 48,94, dan stagnan di angka 48,66 pada dua tahun terakhir (2023–2024). Angka ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Selatan, yang mencatat rasio ketergantungan sekitar 47,09 hingga 47,49. Rasio ketergantungan mengukur jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun). Dengan demikian, setiap 100 penduduk usia kerja di Muara Enim harus "menanggung" hampir 49 penduduk yang tidak berada dalam kelompok usia produktif.

Angka ini mengindikasikan beban ekonomi dan sosial yang cukup besar bagi penduduk usia produktif dan pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin berat pula tanggung jawab sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, karena proporsi penduduk yang memerlukan layanan dasar dan belum atau tidak lagi bekerja relatif besar. Dalam konteks perencanaan pembangunan, data ini menunjukkan pentingnya strategi yang menyeimbangkan investasi pada layanan sosial (bagi kelompok non-produktif) dan penguatan kapasitas produktivitas penduduk usia kerja. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia usia produktif, seperti pelatihan



kerja, pendidikan vokasi, dan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, untuk mengurangi tekanan ketergantungan di masa depan.

Selain itu, angka ketergantungan yang tinggi berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan produktif. Oleh karena itu, pengendalian rasio ketergantungan harus menjadi perhatian dalam RPJMD 2025–2029, terutama dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan reformasi demografi yang adaptif terhadap perubahan struktur penduduk.

2.5.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merujuk pada keterlibatan perempuan usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas) dalam pasar tenaga kerja, baik dalam bentuk bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Indikator ini menjadi penting dalam menilai kontribusi perempuan terhadap perekonomian dan menggambarkan sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan untuk bekerja.

Tabel 0.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	84,73	80,99	83,65	85,94	86,62
Perempuan	55,34	55,63	55,18	58,85	58,86

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 0.11 di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan selama periode 2019 hingga 2023. TPAK laki-laki cenderung berada pada level yang tinggi, meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi laki-laki mencapai 84,73%, mengalami penurunan menjadi 80,99% pada tahun 2020, namun kembali meningkat hingga mencapai 86,62% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan stabilitas partisipasi laki-laki dalam pasar tenaga kerja, meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa tahun tertentu yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, TPAK perempuan relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, TPAK perempuan tercatat sebesar 55,34% dan cenderung stabil di angka sekitar 55%



hingga tahun 2021. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2022, di mana TPAK perempuan mencapai 58,85% dan bertahan di angka 58,86% pada tahun 2023. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam akses dan kesempatan kerja bagi perempuan, yang mungkin didorong oleh program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dan perbaikan kondisi ekonomi pasca-pandemi.

Kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar, yang mengindikasikan adanya hambatan struktural dan sosial yang perlu diatasi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja.

B. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek.

Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan pada 2 (dua) tahun terakhir. Pada Tahun 2019-2021 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim berada di kategori Sangat Inovatif, sementara pada tahun 2022-2023 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim berada di kategori Inovatif.

Tabel 0.12
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021-2023

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	62,97	Sangat Inovatif
2	2022	57,94	Inovatif
3	2023	55,71	Inovatif
4	2024	64,31	Sangat Inovatif

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



Berdasarkan Tabel 0.12, terlihat bahwa kinerja inovasi daerah Kabupaten Muara Enim mengalami dinamika yang cukup fluktuatif sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai Indeks Inovasi Daerah mencapai 62,97 dan masuk kategori “Sangat Inovatif”. Capaian ini menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong budaya inovasi, baik melalui kebijakan, program, maupun layanan publik yang kreatif. Namun, pada 2022 nilai indeks turun menjadi 57,94 dan berada pada kategori “Inovatif”. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beberapa faktor pendukung inovasi mungkin melemah, seperti keterbatasan sumber daya, kebijakan yang belum optimal, atau gangguan akibat faktor eksternal. Tren penurunan berlanjut pada 2023, di mana nilai indeks kembali turun ke 55,71 meskipun tetap dalam kategori “Inovatif”, yang menandakan bahwa performa inovasi masih terjaga tetapi tidak sekuat dua tahun sebelumnya. Menariknya, pada 2024 nilai indeks melonjak kembali ke 64,31 dan kembali masuk kategori “Sangat Inovatif”. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan kembali strategi inovasi di tingkat daerah, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim memiliki potensi besar dalam menjaga dan meningkatkan kapasitas inovasinya, tetapi keberlanjutan program dan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk mempertahankan capaian “Sangat Inovatif” di masa mendatang.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Konsep ekonomi hijau dan biru kini menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial lintas generasi. Ekonomi hijau mengacu pada sistem ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial, dengan orientasi pada sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi bersih, pertanian berkelanjutan, industri hijau, dan pengelolaan limbah berbasis *circular economy*. Sementara itu, ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya air, baik laut maupun perairan darat, secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan keanekaragaman hayati akuatik.

Dalam konteks ini, Kabupaten Muara Enim memiliki peluang strategis untuk bertransformasi menuju model ekonomi hijau dan biru. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah penghasil energi fosil, terutama batu bara, namun hal tersebut menyimpan tantangan besar terhadap keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam bentuk degradasi lahan, pencemaran



udara, serta tingginya emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, langkah awal dalam integrasi ekonomi hijau dapat dimulai dengan mendorong transisi energi, seperti pengembangan bioenergi dari limbah pertanian, investasi panel surya di fasilitas publik, dan konversi transportasi publik ke energi bersih. Selain itu, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembangunan kawasan industri hijau, serta program pelatihan tenaga kerja hijau akan mempercepat adopsi prinsip ekonomi hijau di sektor-sektor strategis.

Di sisi lain, meskipun Muara Enim bukan wilayah pesisir, namun potensi ekonomi biru tetap relevan melalui pengelolaan sumber daya air darat seperti sungai, embung, dan danau. Program budidaya ikan air tawar berkelanjutan, pengembangan ekowisata berbasis sungai dan air terjun, serta konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) dapat menjadi bagian integral dari ekonomi biru lokal. Lebih lanjut, integrasi antara sistem informasi geospasial, teknologi *smart irrigation*, dan penguatan kelembagaan petani-perikanan akan memperkuat ketahanan ekosistem air sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Secara nasional, komitmen Indonesia terhadap SDGs dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah menempatkan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau sebagai prioritas strategis. Dalam hal ini, transformasi Muara Enim ke arah ekonomi hijau dan biru tidak hanya mendukung target nasional, tetapi juga menciptakan diversifikasi ekonomi daerah, meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat daya saing kawasan di tingkat regional. Dengan dukungan regulasi yang progresif, insentif fiskal hijau, dan keterlibatan aktif masyarakat serta sektor swasta, Kabupaten Muara Enim berpotensi menjadi contoh daerah transformatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan biru di Indonesia.

2.5.3 Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks P-TIK) merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yakni akses dan infrastruktur TIK, tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat, serta keterampilan atau kapabilitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan TIK. Pada dimensi akses dan infrastruktur, indikator yang diperhatikan meliputi jumlah pelanggan telepon tetap, pelanggan seluler, serta akses internet pita lebar yang mencerminkan kesiapan teknologi di suatu wilayah. Selanjutnya, dimensi penggunaan menyoroti sejauh mana masyarakat menggunakan perangkat TIK, termasuk persentase



pengguna internet dan layanan *broadband* seluler, yang mencerminkan penerimaan dan adaptasi masyarakat terhadap transformasi digital.

Sementara itu, dimensi keterampilan berfokus pada kapasitas sumber daya manusia, yang diukur melalui tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah pada jenjang menengah dan atas. Dimensi ini penting karena kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengelola informasi secara efektif. Nilai Indeks P-TIK berkisar antara 0 hingga 10, dengan interpretasi bahwa semakin tinggi angkanya, semakin maju pula kemampuan suatu wilayah dalam mengintegrasikan teknologi untuk pembangunan ekonomi, pemerintahan digital, dan pelayanan publik yang inklusif. Dalam konteks pembangunan daerah, pencapaian Indeks P-TIK yang tinggi mencerminkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi melalui adopsi teknologi yang merata dan berkelanjutan.

B. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/ Laptop/ Tablet

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop/Tablet menurut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepemilikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat rumah tangga pada suatu wilayah administratif. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam satuan persen dan dihitung sebagai proporsi rumah tangga di suatu kabupaten atau kota yang memiliki setidaknya satu perangkat komputer, laptop, atau tablet terhadap total jumlah rumah tangga.

Indikator ini penting karena mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap perangkat TIK yang menjadi sarana utama dalam mengakses informasi, pendidikan digital, layanan pemerintahan elektronik (*e-government*), serta peluang ekonomi berbasis digital. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar pula potensi masyarakat dalam mengikuti transformasi digital, baik untuk keperluan belajar, bekerja, maupun berwirausaha. Sebaliknya, angka yang rendah bisa menunjukkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) akibat faktor ekonomi, infrastruktur, atau literasi digital yang belum merata.



Tabel 0.13
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop/Tablet Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Sumatera Selatan	14,97	14,42	14,42	14,78	14,93
Kabupaten Muara Enim	16,48	11,14	13,24	12,98	14,05

Sumber: BPS

Persentase rumah tangga yang memiliki komputer, laptop, atau tablet merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan digital masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Indikator ini mencerminkan tingkat kepemilikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berfungsi sebagai pintu masuk utama menuju transformasi digital, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan publik berbasis elektronik. Di era digital saat ini, kepemilikan perangkat TIK bukan lagi sekadar simbol kemajuan teknologi, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar untuk menunjang produktivitas, pembelajaran daring, serta partisipasi dalam ekonomi digital dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

Tingginya persentase rumah tangga yang memiliki komputer, laptop, atau tablet menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut relatif memiliki akses terhadap teknologi pendukung, sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi digital. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepemilikan perangkat ini dapat menjadi indikator adanya kesenjangan digital (*digital divide*), yang bisa disebabkan oleh keterbatasan daya beli, minimnya infrastruktur, atau rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal atau kurang berkembang.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, analisis terhadap indikator ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang bersifat inklusif dan adaptif. Pemerintah daerah dapat menjadikan data ini sebagai dasar untuk menyusun program strategis seperti bantuan perangkat TIK bagi rumah tangga miskin, pelatihan keterampilan digital, hingga pembangunan pusat layanan internet publik. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan perangkat TIK di tingkat rumah tangga perlu menjadi bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan transformasi digital di daerah, guna mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh, produktif, dan siap menghadapi era digital secara berkeadilan.



2.5.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen utama dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan investasi pada aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, dan sarana produksi lainnya yang memiliki umur pakai lebih dari satu tahun. Dalam konteks Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, PMTB memainkan peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang dan transformasi struktural suatu perekonomian.

Secara domestik, tingginya nilai PMTB mencerminkan peningkatan kapasitas produksi nasional dan perbaikan infrastruktur yang memungkinkan konektivitas antarwilayah menjadi lebih efisien. Hal ini mendorong pemerataan pembangunan, integrasi pasar domestik, dan kelancaran arus barang, jasa, serta faktor produksi. Peningkatan PMTB juga mencerminkan keyakinan pelaku usaha terhadap stabilitas dan prospek ekonomi nasional, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak eksternal.

Sementara dalam konteks global, PMTB menjadi penunjuk awal daya tarik suatu negara atau daerah terhadap arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Investasi global sangat mempertimbangkan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana produksi, yang tercermin dari nilai PMTB. Di sisi lain, PMTB yang tinggi menunjukkan kesiapan suatu negara dalam berintegrasi ke dalam rantai pasok global (*global value chains*), melalui penguatan sektor manufaktur, digitalisasi ekonomi, dan industri berbasis ekspor.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keterbukaan dan kinerja ekonomi suatu negara atau daerah dalam konteks integrasi ekonomi domestik dan global. Ekspor mencerminkan kemampuan suatu entitas ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang kompetitif dan dibutuhkan oleh pasar internasional, sekaligus menunjukkan sejauh mana ekonomi domestik terhubung dengan dinamika perdagangan global dan rantai pasok internasional.

Dalam konteks integrasi ekonomi domestik, ekspor berperan sebagai penggerak pertumbuhan sektor-sektor produksi dalam negeri, khususnya industri pengolahan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa unggulan. Aktivitas ekspor mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, penyerapan tenaga kerja, perbaikan neraca transaksi berjalan, serta distribusi nilai tambah ke berbagai wilayah di dalam negeri. Selain itu, ekspor juga memacu



inovasi, modernisasi teknologi, serta peningkatan standar mutu produk domestik karena tuntutan pasar global yang kompetitif.

Sementara itu, dalam konteks integrasi ekonomi global, ekspor mencerminkan posisi strategis suatu negara atau daerah dalam sistem perdagangan internasional dan *global value chains* (rantai nilai global). Semakin tinggi nilai ekspor barang dan jasa, semakin besar kontribusi ekonomi domestik terhadap pasar global, dan semakin dalam keterhubungannya dengan negara lain baik melalui perdagangan langsung maupun kemitraan lintas sektor. Ekspor jasa, termasuk pariwisata, transportasi, pendidikan, dan jasa digital, juga menjadi sumber devisa yang strategis dalam era ekonomi berbasis pengetahuan.

2.5.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) mengacu pada suatu pengukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan atau kualitas pembangunan infrastruktur suatu wilayah. Beberapa faktor yang mungkin termasuk dalam pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah ketersediaan layanan, kualitas infrastruktur, kehandalan, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 0.14
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

Variabel Pelayanan	IKLI	Rata-Rata Tingkat Kepuasan	Mutu Layanan	Kinerja Layanan
Jalan dan Jembatan	3,677	73,54	B	Baik
Infrastruktur Air Bersih	3,332	66,63	C	Cukup Baik
Infrastruktur Perumahan	3,413	68,26	B	Baik
Infrastruktur Ruang Publik	3,159	66,56	C	Cukup Baik
Infrastruktur Pelayanan Publik	3,566	71,31	B	Baik
Infrastruktur Irigasi	3,406	68,12	B	Baik
Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,244	64,88	C	Cukup Baik
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	3,075	60,43	C	Cukup Baik
	3,359	67,47	C	Cukup Baik

Sumber: Bappeda (Laporan Penyusunan Indeks Pelayanan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023)



Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 memperoleh Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 3,359 atau 67,47% dengan kinerja Kategori C (Cukup Baik). Dari delapan Variabel, skor tertinggi ada pada variabel Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan skor 3,677 dengan tingkat kepuasan 73,54% dan indeks kepuasan layanan infrastruktur terendah ada pada variabel sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dengan skor 3,075 atau tingkat kepuasan sebesar 60,43%.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Berikut ini indikator persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 0.15
Indikator Kualitas Hunian di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	90,37	90,86	91,03	N/A	N/A

Berdasarkan data pada Tabel 0.15, terlihat adanya tren peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Muara Enim selama periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, proporsi tersebut tercatat sebesar 89,64 persen, kemudian meningkat menjadi 90,37 persen pada tahun 2020. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2021 dengan angka 90,86 persen, dan kembali meningkat menjadi 91,03 persen pada tahun 2022. Meskipun data tahun 2023 belum tersedia, tren selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan aksesibilitas terhadap hunian layak dan terjangkau, yang mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas permukiman bagi warganya.

C. Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan konsep pembangunan desa yang mencerminkan tingkat kemandirian tertinggi dalam struktur klasifikasi pembangunan desa di Indonesia. Sebagai bentuk ideal dari kemajuan desa, desa mandiri adalah desa yang telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, mengelola potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan, serta mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi secara seimbang tanpa ketergantungan besar pada bantuan eksternal, khususnya dari pemerintah pusat. Konsep



ini berakar pada semangat desentralisasi dan penguatan pemerintahan desa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa mandiri ditandai oleh tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif, kemampuan fiskal yang semakin mandiri, serta masyarakat yang aktif dalam pembangunan dan inovatif dalam mengelola potensi lokal. Capaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dimulai dari akar rumput, sekaligus mencerminkan efektivitas intervensi kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan jumlah desa mandiri tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara langsung, tetapi juga memperkuat struktur pembangunan nasional secara keseluruhan.

Tabel 0.16
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	1,00	1,00	3,00	9,00	18,00

Sumber: Dinas PMD Kab. Muara Enim

Berdasarkan Tabel 0.16, perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020–2024. Pada awal periode, yaitu tahun 2020 dan 2021, persentase desa mandiri masih stagnan pada angka 1,00%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar desa masih berada pada tahap berkembang atau maju. Namun, mulai tahun 2022 terjadi lonjakan progresif, dengan peningkatan menjadi 3,00%, lalu naik tajam menjadi 9,00% pada 2023, dan akhirnya mencapai 18,00% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, seiring dengan semakin kuatnya intervensi pembangunan berbasis potensi lokal.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendorong transformasi desa melalui pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta pengelolaan sumber daya secara partisipatif dan berkelanjutan. Program seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kualitas layanan dasar, dan penyusunan dokumen perencanaan desa yang berbasis data menjadi faktor pendukung yang signifikan. Selain itu, integrasi desa dalam sistem digital pemerintahan dan peningkatan literasi keuangan juga turut mempercepat proses menuju status desa mandiri.



Capaian ini patut diapresiasi karena mencerminkan arah pembangunan desa yang semakin matang dan berdaya saing. Namun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga kesinambungan status desa mandiri agar tidak bersifat administratif semata, melainkan tercermin dalam kualitas hidup warga, ketahanan ekonomi lokal, serta tata kelola yang responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan jumlah desa mandiri harus diikuti dengan penguatan aspek monitoring, pembinaan, dan inovasi desa, sehingga transformasi ini benar-benar berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.5.6 Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan

A. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital. Indeks SPBE diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 0.17
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	3,27	2,73	2,91	3,00	3,29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, 2024

Berdasarkan Tabel 0.17, perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun berujung pada perbaikan skor secara keseluruhan. Pada tahun 2020, indeks SPBE Kabupaten Muara Enim berada di angka 3,27, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 2,73 pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi tren pemulihan bertahap dengan peningkatan indeks menjadi 2,91 pada 2022, kemudian 3,00 pada 2023, dan kembali meningkat ke angka 3,29 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun sempat menghadapi tantangan dalam tata kelola digital pemerintahan, Kabupaten Muara Enim berhasil mengembalikan dan sedikit melampaui level indeks awal tahun 2020.



Penurunan pada tahun 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurang optimalnya integrasi aplikasi layanan publik antar perangkat daerah, lemahnya interoperabilitas sistem informasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Kondisi ini juga bisa diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengalihkan fokus anggaran dan sumber daya ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. Namun, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan arsitektur SPBE, serta peningkatan literasi digital ASN, tampaknya mulai menunjukkan hasil positif pada tahun-tahun berikutnya.

Peningkatan skor pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan keberhasilan awal reformasi digital di lingkungan birokrasi Kabupaten Muara Enim. Namun, indeks SPBE yang masih berkisar pada angka 3,29 menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan masih berada pada tahap penguatan, belum mencapai tingkat yang sepenuhnya matang atau sistemik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola TI, konsolidasi layanan digital yang terintegrasi, serta penguatan kebijakan keamanan informasi dan manajemen data. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan tidak hanya menjadi sarana efisiensi, tetapi juga fondasi untuk menciptakan layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.

B. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai bagian dari upaya untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

Tabel 0.18
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	58,53	59,42	60,78	63,28	80,71
kategori	CC	CC	BB	BB	A-

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2024



Data pada Tabel 0.18 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 nilai indeks berada pada angka 58,53 dengan kategori CC, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 59,42 pada tahun 2021 (masih kategori CC) dan 60,78 pada tahun 2022 yang sudah masuk kategori BB. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2023 dengan nilai 63,28 (kategori BB) dan mencapai lonjakan yang lebih tajam pada tahun 2024 dengan nilai 80,71 (kategori A-). Tren ini menunjukkan adanya kemajuan konsisten dalam implementasi program reformasi birokrasi, khususnya peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Perpindahan kategori dari CC menuju A- mencerminkan perbaikan signifikan pada sistem manajemen kinerja birokrasi, kepemimpinan perubahan, serta penguatan pengawasan dan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lonjakan nilai pada tahun 2024 juga dapat diinterpretasikan sebagai hasil akumulasi program strategis yang dilakukan pemerintah daerah sebelumnya, seperti penataan kelembagaan, penguatan kapasitas aparatur, dan penerapan sistem berbasis teknologi untuk mendukung transparansi. Dengan kata lain, Kabupaten Muara Enim telah berhasil menunjukkan progres yang berkelanjutan dan signifikan dalam reformasi birokrasi, yang menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah melaksanakan manajemen kinerja secara efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil (*outcome*). SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran pemerintah sejalan dengan capaian target pembangunan serta memberikan gambaran akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah.

Tabel 0.19
Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	73,49	74,54	74,83	75,41	76,51
Kategori	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2024



Data pada Tabel 0.19 menunjukkan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024 yang secara konsisten berada pada kategori BB dengan tren nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2020 nilai SAKIP tercatat sebesar 73,49, kemudian naik menjadi 74,54 pada tahun 2021 dan 74,83 pada tahun 2022. Kenaikan berlanjut di tahun 2023 dengan nilai 75,41 dan mencapai 76,51 pada tahun 2024 sebagai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun kategori SAKIP belum berubah ke tingkat yang lebih tinggi, pola peningkatan nilai ini merefleksikan adanya perbaikan berkesinambungan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Konsistensi dalam kategori BB juga menunjukkan bahwa tata kelola kinerja pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang baik, dengan fokus pada peningkatan kualitas program, efisiensi anggaran, dan integrasi sistem pelaporan yang lebih transparan. Capaian ini dapat diartikan sebagai hasil penguatan budaya kinerja berbasis hasil (*result-based management*), komitmen pimpinan daerah dalam mengawal akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam merumuskan indikator kinerja yang lebih terukur. Dengan tren positif ini, Kabupaten Muara Enim memiliki peluang besar untuk menembus kategori A di masa mendatang apabila upaya perbaikan, inovasi manajemen kinerja, dan penguatan sistem pengawasan terus dilakukan secara konsisten dan terarah.

D. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini lahir sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh layanan yang transparan, adil, dan akuntabel. Melalui IPP, pemerintah memperoleh gambaran obyektif mengenai kinerja unit penyelenggara layanan, sekaligus mendorong instansi terkait untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam standar, prosedur, dan sistem pelayanan yang mereka berikan. Penilaian IPP dilakukan dengan menelaah berbagai dimensi penting, antara lain keberadaan dan kualitas standar pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, kelayakan sarana dan prasarana, keterbukaan sistem informasi pelayanan, serta efektivitas mekanisme pengaduan dan respons terhadap masukan masyarakat. Dimensi-dimensi ini diukur dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga menghasilkan nilai IPP yang dinyatakan dalam skala 0–100 dan diklasifikasikan ke dalam kategori seperti A (sangat baik), B (baik), C (kurang baik), hingga D (buruk). Kehadiran IPP memberikan manfaat strategis karena berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi unit pelayanan yang masih



memerlukan pembenahan, mendorong inovasi pelayanan publik yang lebih responsif, serta memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan kata lain, IPP bukan sekadar alat ukur, tetapi juga instrumen pembelajaran yang membantu instansi pemerintah meningkatkan kualitas layanan dan memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tabel 0.20
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	3,48	3,90	4,10	4,20	4,56
Kategori	B-	B	A-	A-	A

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2024

Data pada Tabel 0.20 memperlihatkan perkembangan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024 yang menunjukkan tren peningkatan nilai dan kategori secara konsisten. Pada tahun 2020 nilai IPP tercatat sebesar 3,48 dengan kategori B-, kemudian naik menjadi 3,90 pada tahun 2021 yang masuk kategori B. Pada tahun 2022 nilai IPP meningkat lagi menjadi 4,10 sehingga berhasil masuk kategori A-, dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 4,20 yang tetap berada di kategori A-. Puncaknya, pada tahun 2024 IPP mencapai nilai tertinggi yaitu 4,56 dan masuk kategori A, yang menunjukkan lonjakan signifikan dalam kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan pada standar pelayanan, profesionalisme aparatur, sarana-prasarana layanan, keterbukaan informasi, dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat. Peralihan kategori dari B- menuju A dalam kurun waktu lima tahun mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tren positif ini juga memperlihatkan bahwa upaya reformasi pelayanan publik yang dilakukan secara sistematis telah menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

E. Nilai Survey kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan, baik di instansi pusat maupun daerah. IKM diatur



dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks ini memberikan gambaran obyektif tentang persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga instansi pemerintah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pelayanan mereka.

Tabel 0.21
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	81,26	80,20	89,51	84,42	88,78
Kategori	Baik	Baik	Sangat baik	Baik	Sangat baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2024

Data pada Tabel 0.21 memperlihatkan perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Muara Enim selama periode 2020–2024 yang cenderung positif dan menunjukkan kualitas layanan publik yang relatif baik hingga sangat baik. Pada tahun 2020 nilai IKM tercatat sebesar 81,26 dengan kategori baik, sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 80,20 namun tetap berada dalam kategori baik. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dengan nilai 89,51 yang berhasil mengangkat IKM ke kategori sangat baik, meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 84,42 dan kembali ke kategori baik. Namun, pada tahun 2024 nilai IKM kembali naik menjadi 88,78 dan masuk kategori sangat baik, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan setelah fluktuasi di tahun sebelumnya. Perubahan nilai dan kategori ini menggambarkan dinamika pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim yang secara umum terus mengalami perbaikan dalam standar pelayanan, responsivitas aparatur, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Keberhasilan mencapai kategori sangat baik pada dua tahun berbeda (2022 dan 2024) menegaskan bahwa upaya pembenahan dan inovasi layanan telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.



F. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah penilaian profesional yang diberikan oleh BPK terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan hasil pemeriksaan. Opini ini bertujuan untuk menilai sejauh mana laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini BPK menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda) karena mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Opini BPK, khususnya WTP, menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemda telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana publik dapat diukur melalui bagaimana tata kelola keuangan yang dilakukan, dalam lima tahun terakhir Kabupaten Muara Enim selalu menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Artinya laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Diterimanya opini WTP dari BPK ini menempatkan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah dengan Predikat opini WTP ke-11 kali berturut-turut tanpa putus sejak tahun 2013.

2.5.6 Koperasi, UMKM, dan Investasi

A. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Koperasi dan UKM. Urusan bidang Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Tabel 0.22
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koperasi aktif	348	418	377	391	411
Jumlah koperasi	498	507	509	423	423
Jumlah UMKM	9.210	9.543	13.727	15.729	N/A

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim, 2024

Data pada Tabel 0.22 menunjukkan perkembangan jumlah koperasi aktif, jumlah total koperasi, dan jumlah UMKM di Kabupaten Muara Enim selama periode 2020 hingga 2024.



Secara umum, terjadi dinamika dalam jumlah koperasi aktif setiap tahunnya, yang mencerminkan tingkat keberfungsian kelembagaan koperasi di daerah. Pada tahun 2020, dari total 498 koperasi yang tercatat, sebanyak 348 di antaranya tergolong aktif atau beroperasi secara fungsional. Jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan cukup signifikan pada 2021 menjadi 418 unit dari 507 total koperasi. Namun, terjadi sedikit penurunan pada 2022, di mana koperasi aktif menurun menjadi 377 meskipun jumlah koperasi meningkat menjadi 509. Penurunan ini bisa menunjukkan tantangan dalam keberlanjutan operasional koperasi, baik dari sisi manajemen, modal, maupun adaptasi terhadap dinamika ekonomi lokal.

Pada tahun 2023, terjadi pemulihan dengan meningkatnya koperasi aktif menjadi 391 dari total 423 koperasi, yang kemudian kembali naik menjadi 411 koperasi aktif di tahun 2024, dengan jumlah koperasi tetap sebanyak 423. Peningkatan persentase koperasi aktif ini menunjukkan arah yang positif terhadap revitalisasi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, digitalisasi, dan integrasi dengan sektor UMKM.

Sementara itu, jumlah UMKM di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2020, tercatat sebanyak 9.210 UMKM, meningkat menjadi 9.543 di 2021, melonjak signifikan menjadi 13.727 pada 2022, dan terus naik menjadi 15.729 pada 2023. Data tahun 2024 belum tersedia, namun tren ini menggambarkan bahwa sektor UMKM terus berkembang dan berpotensi menjadi motor utama penggerak ekonomi lokal, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Hubungan sinergis antara koperasi dan UMKM perlu terus diperkuat melalui pembinaan, akses pembiayaan, serta kemudahan berusaha agar koperasi dapat berperan sebagai aggregator dan penguat daya saing UMKM di era digital dan pasar bebas.

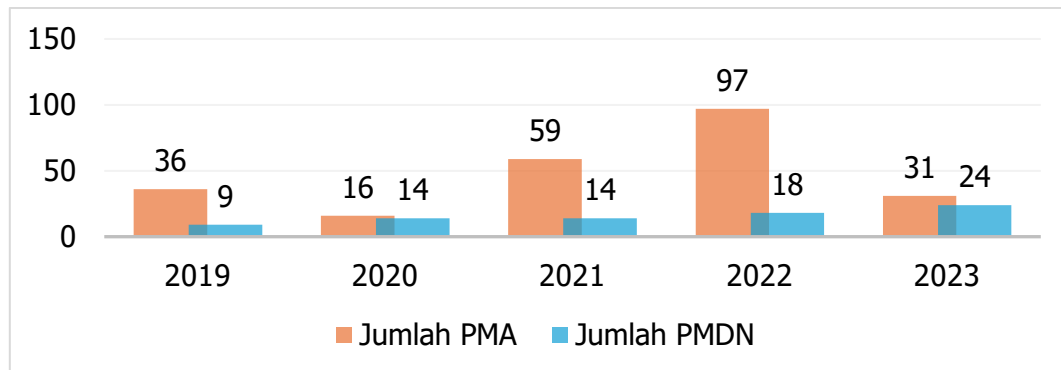
B. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Penanaman Modal. Urusan bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.



Jumlah Investor PMA dan PMDN

Berikut ini jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019-2023.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muara Enim, 2024

Gambar 0.14
Jumlah Investor PMA/PMDN yang Berinvestasi
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 0.14, jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Muara Enim menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Jumlah investor PMA mengalami peningkatan signifikan dari 36 investor pada tahun 2019 menjadi 59 investor pada tahun 2021. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah investor PMA mencapai 97 investor, sebelum menurun kembali menjadi 31 investor pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah investor PMDN relatif lebih stabil, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Pada tahun 2019, terdapat 9 investor PMDN, dan angka ini cenderung fluktuatif dengan puncaknya di tahun 2023, di mana jumlah investor PMDN mencapai 24 investor.

Peningkatan signifikan jumlah investor PMA pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim menjadi destinasi yang menarik bagi investor asing, kemungkinan didorong oleh potensi sumber daya alam yang melimpah dan kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi. Namun, penurunan tajam pada tahun 2023 menunjukkan adanya kemungkinan faktor eksternal atau internal yang mengurangi minat investor asing, seperti ketidakpastian ekonomi global atau perubahan regulasi.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Berikut ini nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019-2023.

Tabel 0.23
Nilai Investasi (dalam juta) PMA dan PMDN
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PMDN	847.178	1.137.081	3.116.006	3.756.985	3.906.127
PMA	8.183.224	8.850.965	9.109.493	13.177.867	4.318.348

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muara Enim, 2024

Berdasarkan Tabel 0.23, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Muara Enim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama periode 2019 hingga 2023, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa tahun. Pada tahun 2019, nilai investasi PMDN mencapai 847.178 juta rupiah dan meningkat bertahap hingga mencapai 3.116.006 juta rupiah pada tahun 2021. Pertumbuhan terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana investasi PMDN mencapai angka tertinggi sebesar 3.906.127 juta rupiah.

Sementara itu, nilai investasi PMA berada pada tingkat yang jauh lebih besar dibandingkan PMDN. Pada tahun 2019, investasi PMA mencapai 8.183.224 juta rupiah dan mengalami peningkatan bertahap hingga puncaknya pada tahun 2022 sebesar 13.177.867 juta rupiah. Namun, pada tahun 2023, nilai investasi PMA mengalami penurunan tajam ke angka 4.318.348 juta rupiah. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan hambatan investasi, baik dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global maupun faktor internal seperti perubahan kebijakan investasi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan signifikan pada nilai investasi PMDN menandakan bahwa investor domestik mulai berperan lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Di sisi lain, meskipun PMA tetap menjadi sumber utama investasi, fluktuasi yang tajam menunjukkan perlunya pemerintah daerah memperkuat iklim investasi dengan memberikan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta fasilitas penunjang bagi investor asing. Dengan stabilitas dan keberlanjutan investasi, Kabupaten Muara Enim dapat memaksimalkan potensi ekonominya dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang.



2.6 Analisis Kondisi Masa Depan

Secara normatif, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konteks RPJMD dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Perencanaan strategik menitikberatkan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sedangkan perencanaan operasional fokus pada pencapaian kinerja layanan pada setiap urusan pemerintahan daerah. RPJMD berfungsi sebagai penerjemah visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat diimplementasikan. Perencanaan strategik, yang didukung oleh kinerja implementasi perencanaan operasional, menjadi kerangka kerja yang sinergis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya terkait fokus atau tema pembangunan tahunan selama periode RPJMD, penting untuk mempertimbangkan pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam setiap misi pembangunan. Evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil agar target-target indikator sasaran misi dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya menjadi lebih jelas dan terukur. Berikut dijelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap tujuan dan sasaran yang mendukung terhadap ketercapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029.

Dalam analisis kondisi masa depan suatu pemerintah daerah, biasanya digunakan pendekatan perencanaan strategis yang mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut adalah faktor-faktor utama yang perlu dianalisis:

2.6.1 Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.



Permasalahan pembangunan di Kabupaten Muara Enim secara umum menyerupai daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki kesamaan karakteristik kewilayahan baik secara aspek geografis, aspek demografis, maupun aspek potensi daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Muara Enim dinilai dari permasalahan yang terjadi pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Periode RPJPD tersebut, serta berpedoman dengan arah kebijakan tahap I (tahun 2005-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 Kabupaten Muara Enim yaitu “Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Terutama Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan”. Perumusan masalah juga dilakukan dari hasil pendekatan secara teknokratik dan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen-komponen atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan hasil analisis terdapat masalah pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Muara Enim, berikut ini disajikan masalah pokok, masalah dan akar masalah.

1. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan baik nasional maupun internasional masih menjadi permasalahan yang dihadapi Kabupaten Muara Enim, sampai dengan tahun 2022 tingkat kemiskinan masih berada pada tingkat dua digit meskipun demikian terjadi penurunan sampai dengan angka 9 persen pada tahun 2022. Berikut ini masalah dan akar masalahnya:

a. Pendapatan rendah dan biaya hidup tinggi pada kelompok miskin

Akar masalah rendahnya pendapatan serta tingginya pengeluaran pada kelompok penduduk miskin yaitu:

- Mayoritas penduduk bekerja pada sektor informal
- Keterbatasan dalam mengakses Keuangan dan Kredit Mikro
- Belum optimalnya cakupan peserta KB aktif

b. Tingkat pengangguran masyarakat masih tinggi

Akar masalah Tingkat pengangguran masyarakat masih tinggi yaitu:



- Tingkat pendidikan penduduk/pencari kerja mayoritas berpendidikan dasar dan menengah
- Rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil
- Belum optimalnya kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) daerah
- Belum adanya sinergitas antara pemerintah dan swasta terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal

c. Belum Optimalnya Jaminan Sosial

Belum optimalnya cakupan jaminan sosial memiliki akar masalah:

- Bantuan Sosial masih ada yang tidak tepat sasaran
- Penduduk yang mayoritas bekerja di sektor informal tidak dicover asuransi atau jaminan ketenagakerjaan
- Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

d. Infrastruktur Dasar Tidak Merata

Tidak meratanya infrastruktur dasar disebabkan karena

- Masih banyak penduduk miskin yang mendiami rumah tidak layak huni
- Masih banyak penduduk miskin yang mendiami hunian dengan air minum dan sanitasi layak

e. Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Berbasis Data Belum Optimal

Tata kelola menjadi salah satu penyebab sulitnya upaya penanggulangan kemiskinan, akar permasalahannya yaitu:

- Masih ada *inclusion* dan *exclusion error* dalam pengelolaan data kemiskinan
- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan belum berjalan efektif
- Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat belum berjalan sinergis

2. Kualitas Pendidikan Belum Optimal

IPM Kabupaten Muara Enim masih masuk dalam kategori sedang pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Muara Enim masih belum optimal. Belum optimalnya pembangunan manusia disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi pendidikan relatif masih rendah,
- Masih banyaknya anak usia sekolah menjadi tulang punggung keluarga
 - Mahalnya biaya operasional penunjang sekolah



- b. Pendidikan belum berfokus pada kualitas dan daya saing. Pendidikan masih berfokus pada partisipasi dan akses, permasalahan rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan disebabkan oleh,
 - Persentase Sekolah terakreditasi minimal B relatif rendah
 - Persentase guru bersertifikat pendidik masih rendah pada jenjang tertentu
 - Masih ada *missmatch* antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja
 - Tingkat literasi dan numerasi rendah
- c. Akses terhadap fasilitas dan SDM pendidikan belum merata,
 - Masih belum optimalnya fasilitas penunjang pendidikan
 - Belum meratanya tenaga pendidik yang dibutuhkan di setiap tingkatan pendidikan

3. Tingkat Kesehatan Masyarakat Mengalami Penurunan

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar (*Primary Health Care*) belum optimal
 - Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal tercermin dari: Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk
 - Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak belum optimal tercermin dari: Meningkatnya angka kematian Neonatal, Bayi dan balita serta kematian ibu
 - Gizi Ibu dan Anak belum terpenuhi secara optimal, tercermin dari: Rendahnya pemerian ASI Eksklusif untuk bayi 6 bulan, Angka Stunting, malnutrisi masih cukup tinggi
- b. Kualitas Layanan Kesehatan belum optimal
 - Belum meratanya tenaga kesehatan yang dibutuhkan di setiap tingkat Fasilitas Kesehatan
 - Belum maksimalnya sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan
 - Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Layanan Kesehatan belum berjalan

4. Terjadinya Degradasi Kualitas Lingkungan dan Tingginya Risiko Bencana

Degradasi lingkungan merupakan ancaman nyata yang terus memburuk akibat aktivitas manusia yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan, terutama dalam sektor energi. Salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan terhadap *brown energy*, yakni sumber energi berbasis fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan *brown energy* tidak hanya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, tetapi juga mempercepat krisis iklim,



pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap kesehatan publik. Di banyak wilayah, termasuk daerah penghasil energi fosil, degradasi lingkungan telah menciptakan paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan ekologis yang sistemik. Konsep *brown energy* sejatinya mewakili model pembangunan lama yang berbasis ekstraksi dan konsumsi besar-besaran, tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Struktur ekonomi Kabupaten Muara Enim yang sangat bergantung pada sektor *brown energy* berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Berikut ini masalah yang dihadapi

- a. Kerentanan terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim
 - Menurunnya kualitas air akibat kegiatan pertambangan dan penggalian
 - Menurunnya Kualitas Tutupan Lahan yang diakibatkan alih fungsi lahan
 - Indeks Risiko Bencana masuk dalam kategori kerentanan tinggi
 - Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana
 - Masih terdapatnya daerah dengan kerentanan pangan
 - Belum meratanya ketersediaan dan distribusi pangan antar waktu dan wilayah
- b. Tata Kelola Lingkungan yang Lemah
 - Penegakan regulasi lingkungan yang kurang efektif
 - Masih kurangnya instrumen perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

Selain itu Indeks Risiko Bencana Kabupaten Muara Enim meskipun menunjukkan tren positif namun masih masuk dalam kategori tinggi, sehingga masih menjadi perhatian seiring menurunnya kualitas lingkungan.

5. Pengarusutamaan Gender Belum Optimal

Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan mencerminkan ketimpangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun agenda pengarusutamaan gender telah lama diarsukan dalam kebijakan nasional dan daerah. Di banyak sektor strategis, keterlibatan perempuan masih terbatas, baik dalam pengambilan keputusan politik, kepemimpinan birokrasi, hingga akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat potensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan ini kerap diperparah oleh norma budaya patriarkal, lemahnya kebijakan afirmatif, serta minimnya indikator kinerja yang sensitif gender dalam perencanaan pembangunan.



- a Rendahnya peran serta perempuan dalam ekonomi dan politik
Perempuan tidak memiliki keterampilan teknis yang mumpuni dan pendidikan yang cukup untuk dapat bersaing di dunia kerja dan politik, tercemin dari cukup rendahnya Indek Pemberdayaan Gender, Timpangnya TPAK perempuan terhadap laki-laki.
- b Cukup tingginya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan
 - Kesenjangan Partisipasi Ekonomi dan Kesempatan Kerja karena Stereotip gender yang menganggap perempuan bertanggung jawab pada pekerjaan domestik
 - Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
 - Tingginya Angka Kematian Ibu dan Kesehatan Reproduksi yang Buruk
 - Belum optimalnya pemenuhan hak anak
 - Perempuan banyak yang menjadi korban dalam Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya

6. **Belum Optimalnya Penyediaan Fasilitas Publik yang Berkualitas**

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, peningkatan kualitas layanan publik harus diposisikan sebagai agenda prioritas. Ini mencakup reformasi birokrasi yang berbasis merit, digitalisasi pelayanan untuk efisiensi dan transparansi, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan layanan. Pembangunan tidak akan inklusif dan berkelanjutan jika masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar. Oleh karena itu, memperbaiki kualitas layanan publik bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi merupakan fondasi dari kepercayaan publik terhadap pemerintah dan legitimasi kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

- a. Konektivitas dan Aksesibilitas yang belum Merata
 - Masih rendahnya kondisi jalan mantap
 - Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan transportasi sampai ke perdesaan
 - Belum adanya jalur khusus pengangkutan hasil penambangan batubara
 - Masih kurangnya fasilitas prasarana perhubungan
 - Jaringan telekomunikasi yang kuat belum seluruhnya menyentuh daerah
- b. Belum terciptanya kawasan hunian yang berkualitas
 - Terbatasnya cakupan layanan persampahan
 - Belum optimalnya penanganan banjir
 - Masih adanya kawasan kumuh
 - Masih kurangnya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)



- Masih tingginya backlog perumahan

7. Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Maksimal

Belum optimalnya reformasi birokrasi menjadi salah satu hambatan mendasar dalam akselerasi pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Meski berbagai kebijakan reformasi telah digulirkan, seperti penerapan sistem merit, digitalisasi layanan, dan penilaian kinerja melalui SAKIP maupun RB, namun pada praktiknya banyak daerah masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Birokrasi masih cenderung terjebak dalam pola kerja yang administratif, kaku, dan hierarkis, serta belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*result-based*). Fenomena inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, rendahnya inovasi layanan, hingga budaya kerja yang resistif terhadap perubahan menjadi indikator nyata bahwa reformasi belum berjalan secara sistemik dan mendalam.

1) Tata Laksana belum berjalan optimal

- Indeks SPBE masih stagnan
- Masih rendahnya pengelolaan arsip baku di perangkat daerah
- Masih kurangnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah

2) Masih Rendahnya Profesionalisme Aparatur (IP ASN)

- Masih optimalnya upaya daam meningkatkan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan baik melalui pendidikan maupun pelatihan
- Pengukuran kinerja dan penegakan disiplin belum berjalan optimal
- Masih kurangnya ketersediaan SDM pada bagian-bagian tertentu

3) Pengawasan dan Akuntabilitas Belum Berjalan Optimal

- Tingkat kapabilitas apip belum mencapai level 3
- Penerapan manajemen resiko pada perangkat daerah belum memadai
- Indeks efektivitas pengendalian korupsi yang masih rendah
- Nilai SAKIP menunjukan stagnasi dan masih berada pada kategori BB

4) Tingkat Ketergantungan Keuangan Kepada Pemerintah Pusat Masih Tinggi

- Belum optimalnya pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD)
- Pendapatan daerah masih bergantung dari dana transfer pusat (Bagi Hasil - bersumber dari SDA yang memiliki keterbatasan)

8. Kondusivitas Daerah Belum Terjaga Optimal

1) Tingginya angka kriminalitas



- Belum terbinanya Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dengan baik
 - Masih kurangnya pemahaman politik di masyarakat
- 2) Masih Rendahnya Minta Investor untuk berinvestasi
- Kurangnya event/Promosi Daerah
 - Belum optimalnya kinerja Mal Pelayanan Publik (MPP)

9. Ekonomi tidak belum inklusif dan sangat tergantung pada Brown Energy

Ketergantungan pemerintah pada sektor *brown energy*, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, mengandung berbagai risiko strategis yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan membebani generasi mendatang. Pertama, secara ekonomi, ketergantungan ini menjadikan pendapatan daerah sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga energi fosil turun drastis, pendapatan daerah dari royalti dan pajak menurun tajam, yang berdampak langsung pada anggaran pembangunan dan stabilitas fiskal. Kedua, dari sisi lingkungan, eksploitasi *brown energy* berkontribusi besar terhadap kerusakan ekosistem, degradasi lahan, pencemaran udara dan air, serta emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Hal ini tidak hanya merusak daya dukung lingkungan, tetapi juga meningkatkan biaya adaptasi dan mitigasi bencana di masa depan.

Ketiga, secara sosial-politik, ketergantungan pada energi fosil cenderung menciptakan ketimpangan wilayah dan ketidakadilan antargenerasi. Wilayah penghasil energi sering kali mengalami paradoks pembangunan, kaya sumber daya tapi miskin kualitas hidup, akibat model ekstraktif yang tidak inklusif. Selain itu, ketergantungan ini memperlambat transisi menuju ekonomi hijau dan energi bersih, yang justru menjadi arah global dan komitmen nasional dalam agenda dekarbonisasi.

- a. Kontribusi Industri Kerakyatan dan Industri Kecil Masih Rendah
 - Masih rendahnya persentase koperasi sehat
 - Belum optimalnya fasilitasi pemasaran produk UMK
 - Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa
 - Belum optimalnya akses permodalan UMK dan koperasi
- b. Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan
 - Pengelolaan masih menggunakan pendekatan tradisional
 - Produk olahan belum bernilai tambah sehingga sulit bersaing
 - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian



2.6.2 Telaahan Isu Internasional

Berdasarkan hasil telaahan berikut ini isu-isu internasional yang akan berdampak pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

1. Krisis Iklim dan Perubahan Lingkungan

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Perubahan iklim menjadi ancaman utama dengan peningkatan suhu global, naiknya permukaan air laut, serta cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan krisis pangan, migrasi besar-besaran, dan gangguan rantai pasok (WEF *Global Risks Report* 2022).

2. Krisis Air Global dan Kekurangan Sumber Daya

Sumber daya air global semakin terancam akibat pertumbuhan populasi, industrialisasi, perubahan iklim, dan polusi. Diperkirakan, lebih dari 40% penduduk dunia akan menghadapi kekurangan air bersih pada 2040 (UN-*Water World Water Development Report*). Krisis air dapat memicu konflik antarnegara, mengganggu produksi pangan, dan menyebabkan ketegangan sosial, terutama di wilayah yang sudah rentan seperti Afrika dan Timur Tengah. Kekeringan berkepanjangan juga akan menurunkan hasil panen dan memperburuk kemiskinan.

3. Krisis Energi dan Transisi Energi

Dunia menghadapi kebutuhan mendesak untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan guna mengurangi emisi karbon. Namun, transisi ini tidak merata dan menghadapi tantangan teknis, ekonomi, serta geopolitik. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dan keterlambatan dalam transisi menuju energi terbarukan dapat mengakibatkan ketidakstabilan energi global dan kenaikan harga energi - *International Energy Agency* (IEA).

4. Ketimpangan Ekonomi dan Krisis Sosial

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan, serta kesenjangan akses terhadap pendidikan dan teknologi, diproyeksikan akan memperdalam krisis sosial di banyak negara (WEF *Global Risks Report* 2022). Kelompok kaya cenderung pulih lebih cepat dari krisis ekonomi, sementara kelompok miskin menghadapi kesulitan yang berkepanjangan. Kesenjangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan teknologi memperparah situasi, terutama di negara berkembang.



5. Krisis Keamanan Pangan

Produksi pangan global menghadapi ancaman besar dari perubahan iklim, degradasi lahan, dan gangguan rantai pasok. Ketidakstabilan geopolitik juga memperburuk situasi (FAO *Food Security Report*). Krisis pangan berpotensi memperburuk angka kemiskinan dan kelaparan di dunia, terutama di wilayah sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Gangguan produksi beras, gandum, dan jagung dapat memicu inflasi harga pangan global.

6. Perkembangan Teknologi dan Risiko *Cybersecurity*

Dunia yang semakin digital juga meningkatkan risiko serangan siber terhadap infrastruktur penting seperti sistem keuangan, energi, dan komunikasi (WEF *Global Risks Report 2022*). Serangan siber tidak hanya berpotensi merugikan ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Ancaman ini terus berkembang dengan cepat seiring kemajuan teknologi.

7. Revolusi Industri 4.0 dan Disrupsi Lapangan Kerja

Otomatisasi, robotika, dan kecerdasan buatan akan menggantikan pekerjaan manusia di berbagai sektor, terutama pekerjaan manual dan berulang - *Oxford Economics Future of Work Report*. Meskipun otomatisasi meningkatkan produktivitas, hal ini juga akan menyebabkan pengangguran struktural jika tidak disertai pelatihan ulang tenaga kerja.

Tantangan global di atas merupakan bagian dari megatren global yang tercantum di dokumen RPJPN 2025-2045, Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) perkembangan teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) konstelasi perdagangan global, (vi) tata kelola keuangan global, (vii) pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah serta analisa terhadap kebijakan pembangunan yang harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029, dapat disimpulkan isu strategis pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam 5 tahun ke depan yaitu:



1. **Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan**

Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi isu pembangunan global seperti SDGs yang menempatkan menjadi goals pertama, selanjutnya Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.

Sementara itu, Asta Cita menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, penguatan daya saing daerah tertinggal, serta peningkatan keadilan sosial melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, yang relevan baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.

Selain kemiskinan, ketimpangan masih menjadi masalah pembangunan. Kue pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Lebih lanjut, ketimpangan gender juga masih menjadi masalah, indeks ketimpangan gender jauh di atas nilai Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia, artinya masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

2. **Rendahnya kualitas dan daya saing SDM**

Isu rendahnya kualitas dan daya saing SDM tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, isu ini pun masuk menjadi isu strategis dalam dokumen perencanaan lain baik nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan. Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu pemicu masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM.

Pada bidang pendidikan, tingkat partisipasi dan akses terhadap pendidikan masih cukup rendah tercermin dari angka APK dan APM terutama pada jenjang pendidikan menengah. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar daerah, pemerataan jumlah sekolah serta harus mulai berorientasi pada kualitas. Selanjutnya masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muara Enim pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, meningkatnya angka



kematian ibu, bayi dan balita, masih ditemukan anak bergizi buruk atau stunting. Pemerataan sarana dan prasarana serta sumber daya kesehatan perlu untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Muara Enim masih memiliki kualitas dan daya saing yang rendah, tercermin dari mayoritas angkatan kerja hanya berpendidikan ≤ Sekolah Dasar (SD) dengan keterampilan seadanya. Dengan karakteristik seperti ini, sulit untuk bisa bersaing sehingga lebih banyak terserap di pekerjaan informal atau bahkan menjadi pengangguran.

3. Degradasi Lingkungan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Isu lingkungan menjadi isu sentral dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik menengah maupun panjang, menurunnya kualitas lingkungan dapat memberikan dampak besar dalam pembangunan, meningkatkan ancaman bencana, ketersediaan pangan dan tentu saja berdampak pada perekonomian.

Dengan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor primer/ekstraktif akan berimplikasi serius terhadap lingkungan hidup dan kerentanan terhadap bencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun menjadi tulang punggung perekonomian namun dampak ekologis dan sosialnya sangat besar jika tidak dikelola secara berkelanjutan.

Secara lingkungan, kegiatan pertambangan dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan tutupan lahan, dan pencemaran tanah, air, serta udara. Aktivitas penggalian dan pengupasan lahan dalam skala besar seringkali menghilangkan vegetasi alami yang berfungsi sebagai penyangga ekologis. Hal ini menyebabkan terganggunya siklus hidrologi, meningkatnya erosi dan sedimentasi, serta penurunan kualitas air akibat limbah bahan kimia dan logam berat dari tambang. Selain itu, eksploitasi tambang seringkali tidak memperhatikan pemulihan lahan pasca-tambang, yang memperparah degradasi lingkungan dalam jangka panjang.

Dari sisi kebencanaan, degradasi lingkungan akibat pertambangan dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Misalnya, daerah yang telah kehilangan fungsi hutan dan penutup lahan cenderung tidak mampu menyerap air hujan, sehingga air mengalir langsung ke permukaan dan memicu banjir bandang. Sementara itu, perubahan kontur lahan karena penambangan meningkatkan risiko longsor, terutama di daerah lereng atau perbukitan. Selain itu, keberadaan lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka dapat menjadi titik rawan genangan dan memperparah dampak bencana.



4. **Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan, dalam konteks ini reformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani, sehingga mampu mendorong efisiensi pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ada lima hal yang mengharuskan peningkatan kinerja pada reformasi birokrasi yaitu: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Mendorong Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*), Menjamin Profesionalisme dan Kompetensi ASN, Menjadi Kunci Pencapaian Pembangunan Daerah dan Nasional dan Mendukung Capaian Agenda Strategis.

5. **Ekonomi belum Mandiri dan Berkeadilan**

Perekonomian yang bertumpu pada *brown energy* terutama sektor energi fosil seperti batubara dan minyak bumi menyimpan risiko struktural yang cukup dalam terhadap keberlanjutan dan ketahanan ekonomi daerah. Dalam jangka pendek, sektor ini memang menjanjikan pemasukan besar melalui pajak, retribusi, royalti, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun secara ekonomi makro, model ekonomi ekstraktif seperti ini cenderung menciptakan ketergantungan tinggi terhadap satu jenis komoditas yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Fenomena *commodity boom and bust* sangat mungkin terjadi, di mana ketika harga batubara tinggi, pendapatan daerah melonjak drastis, tetapi saat harga anjlok, APBD ikut terguncang. Situasi ini menyebabkan instabilitas fiskal dan mengganggu kesinambungan belanja pembangunan.

Lebih dalam lagi, sektor ekstraktif cenderung memiliki *capital intensive economy* yakni padat modal dan minim penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini menciptakan paradoks ekonomi: daerah kaya sumber daya alam, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Selain itu, nilai tambah dari sektor ini sebagian besar tidak dinikmati secara lokal karena rantai nilai industri seperti pengolahan, logistik, dan ekspor lebih banyak terkonsentrasi di luar daerah, bahkan luar negeri. Akibatnya, efek *multiplier* ke sektor-sektor ekonomi lain sangat terbatas. Model ini juga menghambat proses diversifikasi ekonomi dan menjadikan struktur ekonomi daerah kurang tangguh terhadap guncangan eksternal.

Ditengah transformasi ekonomi global menuju transisi energi dan ekonomi hijau, ketergantungan pada *brown energy* menempatkan daerah dalam posisi yang makin terpinggirkan. Investor dan mitra dagang internasional mulai mensyaratkan praktik ESG



(*Environmental, Social, and Governance*), yang sulit dipenuhi oleh sektor batubara dan migas. Hal ini tidak hanya mengancam hilangnya sumber-sumber investasi ke depan, tetapi juga mempersulit daerah dalam mengakses insentif pembiayaan hijau (*green financing*) dan pasar ekspor yang mensyaratkan *carbon footprint* rendah. Bila daerah tidak segera merespons perubahan ini, maka risiko *stranded assets* yakni aset-aset ekonomi yang tiba-tiba kehilangan nilai karena regulasi transisi energi akan semakin nyata. Mesin pertumbuhan yang selama ini diandalkan bisa menjadi beban ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan strategi diversifikasi ekonomi secara terencana dan terukur. Sektor-sektor ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal seperti pertanian berkelanjutan, perikanan, pariwisata berbasis alam, industri hilirisasi non ekstraktif, serta ekonomi digital perlu diperkuat. Selain itu, investasi dalam pendidikan vokasional dan riset inovasi menjadi prasyarat untuk menciptakan *human capital* yang mampu bergerak ke sektor-sektor baru yang lebih hijau dan inklusif. Menggeser struktur ekonomi dari *brown economy* menuju *green and resilient economy* bukan hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga strategis untuk menjamin daya saing daerah dalam lanskap ekonomi nasional dan global yang semakin menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan ketangguhan ekonomi.

Selain itu, dalam banyak kasus, daerah yang kaya sumber daya alam justru menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam nilai *Gini Ratio* yang stagnan atau bahkan memburuk. Fenomena ini mencerminkan bahwa manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam tidak tersebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pemilik modal besar dan pelaku industri, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan bagian kecil dari rantai nilai, sering kali dalam bentuk pekerjaan informal, berisiko tinggi, dan berupah rendah.

6. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang belum merata dan berkeadilan

Isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang belum merata serta belum berkeadilan merupakan tantangan mendasar dalam konteks pembangunan daerah. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan akses, kualitas, dan hasil dari pembangunan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dalam satu daerah. Banyak daerah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan, terutama di wilayah pedesaan, perbatasan, kawasan terpencil, dan komunitas adat terpencil. Sementara itu, wilayah perkotaan



atau pusat administrasi cenderung lebih maju karena lebih banyak memperoleh intervensi pembangunan, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun pelayanan publik.

Dalam konteks infrastruktur pelayanan dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, dan fasilitas kesehatan masih banyak desa dan kecamatan di daerah yang mengalami keterbatasan akses atau bahkan belum terlayani secara layak. Misalnya, ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu belum sebanding dengan kebutuhan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Demikian pula, kualitas pendidikan terganggu oleh minimnya sarana prasarana sekolah, rendahnya angka partisipasi sekolah menengah, serta distribusi guru yang tidak merata.

Ketimpangan infrastruktur juga berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat. Wilayah yang memiliki konektivitas jalan yang buruk akan terhambat dalam mengakses pasar, mendapatkan layanan publik, atau memobilisasi hasil produksi. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi lokal yang tidak inklusif dan meningkatkan kesenjangan antarwilayah.

BAB 3

VISI, MISI, DAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH

3.1 Visi Kabupaten Muara Enim

Visi merupakan pernyataan umum mengenai kondisi ideal yang diharapkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga berfungsi sebagai panduan arah



pembangunan atau proyeksi kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (kejelasan arah), yang secara spesifik menanggapi permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu-isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi aktual, permasalahan, dan tantangan Pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2029, yaitu:



Gambar 0.1
Visi Kabupaten Muara Enim 2025-2029

Adapun penjelasan atas *tagline* tersebut adalah:

- **Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera** atau **MEMBARA** adalah Seluruh Pemangku Kepentingan yang satu tekad secara Bersama mengejar ketertinggalan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.
- **Bangkit** adalah ajakan untuk seluruh komponen masyarakat yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Muara Enim mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor.
- **Sejahtera** adalah Masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara berimbang jasmani dan rohani, meningkat perlindungan sosial, kualitas hidup dan lingkungannya, juga mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, serta meningkatkan kemandirian fiskal untuk percepatan pembangunan daerah.
- **Maju** adalah terus mengalami kemajuan pembangunannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, mengandalkan hilirisasi dan nilai tambah pertanian, pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata, memiliki keunggulan dan mampu berkompetisi dengan daerah lain, ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,



peningkatan pelayanan publik, pengembangan inovasi daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya daerah.

- **Berkelanjutan** adalah berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan ekonomi sosial berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna menjaga kelestarian lingkungan.

3.2 Misi Kabupaten Muara Enim

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2025-2029, akan dicapai melalui Misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing;**
2. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif;**
3. **Meningkatkan Infrastruktur dan Supratruktur Dasar yang Unggul dan Merata;**
4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum;**
5. **Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.**

Guna menjamin perencanaan yang berkelanjutan, penting untuk menjaga keselarasan dan konsistensi pada setiap tahap dan tingkatan perencanaan. Hubungan yang harmonis antara misi RPJPD dan misi RPJMD dapat diilustrasikan melalui tabel berikut:

Tabel 0.1
Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Sehat, Berkualitas, dan Terlindungi Hak-Hak Sosialnya	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing
Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif
Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Baik dan Berkualitas	Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik



Misi RPJPD Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif
Misi 7 : Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas Melalui Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan	Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Supratruktur Dasar yang Unggul dan Merata

3.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Muara Enim

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih operasional dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan menggambarkan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merinci kondisi terukur yang diharapkan dapat terealisasi selama periode RPJMD. Penyusunan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan visi pembangunan Kabupaten Muara Enim tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran ini selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pengalokasian sumber daya pembangunan secara efektif dan terarah.

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025–2029, yang akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja, program, kegiatan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tabel 0.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR
VISI : MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN		
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		
1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR
	1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Harapan Lama Sekolah Usia Harapan Hidup (UHH) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
MISI 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif			
1		Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	1.1	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita
2		Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini
	2.1	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	2.2	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin
MISI 3 : Meningkatkan infrastruktur dan supratruktur dasar yang unggul dan merata			
1		Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
	1.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
MISI 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan bencana dan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban umum			
1		Meningkatkan kualitas dan ketahanan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	1.1	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca secara berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif
		Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)
	1.2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah
		Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	1.3	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik			
1		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR
	1.2	Meningkatnya kapasitas inovasi daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Inovasi Daerah
	1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan visi “Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”, arah pembangunan daerah tahun 2026 hingga 2030 dirumuskan secara bertahap dan berkesinambungan melalui penetapan tema pembangunan tahunan. Penetapan tema ini mengacu pada prioritas setiap tahap pembangunan, dimulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pada awal periode, dilanjutkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemantapan pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan serta penguatan daya saing daerah, hingga pemantapan capaian kesejahteraan dan daya saing tersebut.

Puncaknya, pada tahun 2030 ditetapkan tema pembangunan yang merepresentasikan perwujudan visi besar daerah, yaitu “Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera “MEMBARA”. Perumusan tema pembangunan tahunan ini dimaksudkan untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah memiliki fokus yang jelas, terukur, dan saling menguatkan antar tahun, sehingga menghasilkan dampak pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Berikut ini dijelaskan tema tahapan pertahun yang disandingkan dengan tahapan pembangunan tahun 2026-2030.

Tabel 0.3
Sandingan Tahapan Pembangunan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2026-2030

Tahun	Tahapan Pembangunan	Tema Pembangunan
Tahap I 2026	Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas pelayanan dasar	<i>Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar</i>
Tahap II 2027	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemantapan pelayanan public	<i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik</i>
Tahap III 2028	Pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah	<i>Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Daya Saing Daerah</i>
Tahap IV 2029	Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah	<i>Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah</i>
Tahap V 2030	Perwujudan Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera “Membara”	<i>Mewujudkan Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera “Membara”</i>



3.4 Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim

RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 memuat janji politik Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam 20 program strategis **MEMBARA**, yaitu:

1. Sembako murah;
2. Berobat dan BPJS gratis;
3. Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis (dengan meberdayakan penjahit lokal);
4. Bantuan Kendaraan Operasional Desa/Kelurahan;
5. Program Padat Karya di Setiap Desa Untuk Penciptaan 10.000 Lapangan Kerja Baru;
6. Bantuan Operasional dan Kendaraan Bagi Sekolah, Pondok Pesantren dan Ormas Keagamaan;
7. Pembinaan dan Bantuan Modal Gratis bagi UMKM;
8. Melanjutkan Pembangunan Jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang;
9. Jalan Jembatan Desa Mulus dan Pembangunan Jalan Tembus Baru;
10. Peningkatan Jumlah Program Bedah Rumah Gratis;
11. Bebas Pemadaman Listrik dan Terjaminnya Aliran Air Bersih Lancar;
12. PBB Maksimum Rp. 100.000 dibebaskan/gratis;
13. Bantuan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan Baru/Peremajaan (Replanting);
14. Pembangunan Irigasi/ Pengairan Persawahan;
15. Pupuk Tersedia dan Murah;
16. Bantuan Bibit, Benih dan Alat Mesin Pertanian;
17. Pembangunan Mall dan Kawasan Industri/Pusat Pertanian/Agropolitan Untuk Menciptakan 10.000 lapangan kerja Baru;
18. Bantuan Langsung Tunai Untuk Keluarga Harapan, Anak Yatim/Piatu, Disabilitas dan Lansia;
19. Bupati Ngantor di Desa;
20. Santunan Kematian Rp 3.000.000 mudah dan sederhana.

Program strategis tersebut menjadi prioritas dalam periode 5 Tahun RPJMD Kabupaten Muara Enim yang diterjemahkan melalui strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sehingga menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan (RKPD).

3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus



dioperasionalkan secara konkret. Dalam penyusunan RPJMD saat ini, terdapat upaya penyesuaian yang kuat antara visi dan misi daerah, tujuan utama, serta arah kebijakan. Hal ini diwujudkan melalui visi dan misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah, yang merupakan agenda strategis kepala daerah selama periode RPJMD, akan menjadi prioritas utama selama lima tahun untuk mencapai target-target daerah. Implementasi program ini dilakukan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun (2025-2029) dirancang untuk mengatasi isu-isu strategis, yang meliputi:

1. Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan
2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM
3. Degradasi Lingkungan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim
4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Ekonomi belum Mandiri dan Berkeadilan
6. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang belum merata dan berkeadilan

Program-program ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah strategis daerah. Tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur ditetapkan dengan indikator kinerja yang spesifik. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas RPJMD dan Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik.



BAB 4

PENUTUP

Masterplan Muara Enim Smart Regency (2026-2029) merupakan dokumen pendukung atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada. Sebagai sebuah dokumen yang memiliki jangka waktu multi tahun, Masterplan Muara Enim Smart Regency (2026-2029) disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Muara Enim (2025-2029). Oleh karena itu, Masterplan Muara Enim Smart Regency merupakan sebuah dokumen hidup (*living document*) yang akan berkembang seiring perkembangan kebijakan dan prioritas pembangunan di Muara Enim, serta perkembangan teknologi dan dunia.

Sebagai sebuah *living document*, Masterplan Muara Enim Smart Regency dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, baik di tingkat tertinggi di Muara Enim yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga di jajaran Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Daerah Kab. Muara Enim dalam melaksanakan proses pembangunan di Muara Enim dengan pendekatan *smart regency* yang telah dikontekstualisasikan dengan kondisi geo-strategis serta budaya dan tradisi yang luhur yang dimiliki oleh masyarakat muara enim.

Buku I ini merupakan bagian yang mengantarkan kepada hasil analisis dan program-program *smart regency* yang akan disajikan secara mendetil di dalam Buku II Masterplan Muara Enim Smart Regency.